



**2024**

# **LAPORAN KINERJA (LKJ)**



## **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.52 Kedaton Bandar Lampung 35144

Laman : <http://Perpusda.lampungprov.go.id> Pos-el: [dispusip@lampungprov.go.id](mailto:dispusip@lampungprov.go.id)



## KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat Taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024 telah mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat capaian kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja selama periode Tahun 2024.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya, sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) ini. Kami mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif sehingga Laporan ini dapat lebih baik lagi.

Bandar Lampung, Januari 2025.

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN PROVINSILAMPUNG,**  
  
**Riski Sofyan, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV-c  
NIP.198001111998101001



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKj ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, serta dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran yang terdiri atas 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran kinerja. yaitu tujuan ke-1 (kesatu) adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan tujuan ke-2 (kedua) adalah Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.

**Sasaran ke-1 (kesatu)** adalah Meningkatkan Budaya Gemar membaca di Masyarakat terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** dengan nilai realisasi sebesar 64,81 atau dengan nilai capaian sebesar 97,06% dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar 66,77. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada tahun 2024 memperoleh kategori “*sedang*” dalam pencapaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dalam skala Nasional. Serta **Nilai Tingkat Gemar Membaca** dengan nilai realisasi sebesar 67,67 atau dengan



nilai capaian sebesar *101,35%* dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja pada tahun 2024 yaitu sebesar *66,77*. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada tahun 2024 memperoleh kategori “*sedang*” dalam pencapaian indikator Nilai Tingkat Gemar Membaca dalam skala Nasional.

**Sasaran ke-2 (kedua)** adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu **Nilai Digitalisasi Arsip**, dengan nilai realisasi Tahun 2024 sebesar *87,63* dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar *88,00*. Secara umum, capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung adalah sebesar *99,58%* dari target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, serta mendapat predikat “*Memuaskan*” berdasarkan perbandingan realisasi dalam skala Nasional. Serta **Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan** dengan nilai realisasi Tahun 2024 sebesar *86,23* dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar *87,00*. Secara umum, capaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung adalah sebesar *99,11%* dari target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, serta mendapat predikat “*Memuaskan*” berdasarkan perbandingan realisasi dalam skala Nasional.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 mencapai capaian kinerja fisik sebesar ***99,41%*** dari seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Pada Tahun 2024 realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung adalah sebesar ***97,52 %*** dari anggaran yang telah direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa Perencanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah optimal dalam menganggarkan program/kegiatan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Provinsi Lampung.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran



kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait, baik sebagai stakeholders atau pun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung agar menjadikan **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**



## DAFTAR ISI

		Halaman
	<b>KATA PENGANTAR</b>	i
	<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	ii
	<b>DAFTAR ISI</b>	iv
	<b>DAFTAR TABEL</b>	v
	<b>DAFTAR GAMBAR</b>	vii
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	1
1.1	Gambaran Umum	1
1.2	Tugas dan Fungsi	3
1.3	Isu Strategis	10
1.4	Landasan Hukum	12
1.5	Sistematika Penulisan	14
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	15
2.1	Perencanaan Strategis Perubahan Renstra Tahun 2019-2024	15
2.2	IKU Perubahan Renja Tahun 2024	22
2.3	Perubahan Renja Tahun 2024	28
2.4	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	31
2.5	Keselarsan Dokumen Perencanaan Tahun 2024	35
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	38
3.1	Capaian IKU	38
3.2	Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capain Kinerja	45
3.3	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024	102
3.4	Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat (LHE)	107
3.5	Inovasi	109
3.6	Prestasi Perangkat Daerah yang diraih selama Tahun 2024	114
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	116
4.1	Kesimpulan	116
4.2	Rekomendasi	118



## DAFTAR TABEL

1.2.1	Daftar Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024	10
2.1.1	Perubahan Tujuan dan Indikator Tujuan	18
2.1.2	Perubahan Sasaran dan IKU 2024	20
2.2.1	IKU Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024	23
2.4.1	Perubahan Perjanjian Kinerja 2024	33
2.4.2	Pagu Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024	34
2.5.1	Keselarasn Dokumen Perencanaan Tahun 2024	36
2.5.2	Program Unggulan Tahun 2024	36
3.1.1	Capaian Indikator Kinerja Tujuan, IKU sebelum dan setelah Perubahan	43
3.2.1	Pencapaian Sasaran dengan Indikator IPLM	46
3.2.2	Capaian Sasaran dengan Indikator IPLM(Tahun 2024-Nasional)	47
3.2.3	Nilai IPLM Provinsi Lampung Tahun 2024 Berdasarkan Rata-Rata Iplm Seluruh Provinsi Di Indonesia	47
3.2.4	Nilai IPLM Provinsi Lampung Tahun 2024 Berdasarkan Rata-Rata Iplm Kab/Kota Di Provinsi Lampung	49
3.2.5	Rekapitulasi UPLM Provinsi Lampung Tahun 2024	52
3.2.6	Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi indikator IPLM	62
3.2.7	Pencapaian Sasaran dengan indikator Nilai TGM	67
3.2.8	Capaian Sasaran dengan indikator Nilai TGM (Tahun 2024-Nasional)	67
3.2.9	Nilai TGM Nasional Tahun 2024	68
3.2.10	Nilai TGM Kab/Kota se-Provinsi Lampung	69
3.2.11	Nilai TGM Provinsi Lampung Tahun 2024	71
3.2.12	Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi indikator Nilai TGM	73
3.2.13	Pencapaian Sasaran dengan indikator Nilai Digitalisasi Arsip	77



3.2.14	Capaian Sasaran dengan indikator Nilai Digitalisasi Arsip	78
3.2.15	Indikator Nilai Digitalisasi Arsip	78
3.2.16	Nilai Digitalisasi Arsip Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024	80
3.2.17	Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi indikator Nilai TGA	81
3.2.18	Pencapaian Sasaran dengan Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	85
3.2.19	Capaian Sasaran dengan Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	86
3.2.20	NHPK Provinsi Lampung dan Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024	87
3.2.21	Indikator NHPK Tahun 2024	88
3.2.22	Nilai Aspek/Komponen NHPK Eksternal	88
3.2.23	Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi indikator NHPK	99
3.3.1	Realisasi Anggaran per IKU Tahun 2024	102
3.3.2	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2024	103
3.3.3	<i>Refocussing</i> Anggaran Tahun 2024	106
3.4.1	Tindak Lanjut LHE	107



## DAFTAR GAMBAR

1.1.1	Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024	3
2.4.1	Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024	30
3.2.1	Peta IPLM Provinsi Lampung Tahun 2024	50
3.2.2	Indikator IPLM Provinsi Lampung Tahun 2024	51
3.2.3	Pembinaan Perpustakaan Desa Tahun 2024	53
3.2.4	Bimtek Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial Tahun 2024	54
3.2.5	Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024	54
3.2.6	Koleksi Perpustakaan Tahun 2024	55
3.2.7	E-Perpus dan Titik Baca	56
3.2.8	Hari Kunjung dan Bulan Gemar Membaca Provinsi Lampung Tahun 2024	58
3.2.9	Festival Literasi dan Peresmian Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024	61
3.2.10	Kartu Sakti	62
3.2.11	Peta Nilai TGM Lampung Tahun 2024	70
3.2.12	Indikator Nilai TGM	70
3.2.13	Data Naskah di Aplikasi SRIKANDI	83
3.2.14	Sertifikat SIKN Tahun 2024	84
3.2.15	Rakor PKPKT Internal Tahun 2024	95
3.2.16	Audit Kearsipan Internal Tahun 2024	95
3.2.117	Rakor PKPKT Internal Tahun 2024	96
3.2.18	Audit Kearsipan Internal Tahun 2024	97
3.2.19	Bimtek Pengelolaan Arsip Dinamis Tahun 2024	98
3.2.20	Rakor Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024	99



3.2.21	Data Arsip Unggah di SIKN Tahun 2024	102
2.4.1	LHE AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024	108
3.5.1	Tampilan Halaman Download e-Perpus	109
3.5.2	Tampilan Aplikasi di Perangkat Android	110
3.5.3	POCADI di PT. KAI Tanjungkarang	111
3.5.4	Titik Baca Tematik	112
3.6.1	NHPK Kategori Provinsi Tahun 2024	114
3.6.2	Lomba Roket Air Nasional Tahun 2024	115



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Gambaran Umum**

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan ligitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berguna ,berhasil guna, bersih, bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme.

Sebagai wujud dari pelaksanaan azas akuntabilitas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik (*Good Governance*), telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Perpustakaan adalah lembaga yang melayani masyarakat di bidang informasi. Keberadaan lembaga ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi baik itu untuk pendidikan, hiburan, rekreasi maupun penelitian. Oleh karenanya, sebagai lembaga informasi perpustakaan harus selalu mampu menyediakan informasi yang relevan



dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya. Tugas pokok Kantor Arsip Daerah adalah menyelenggarakan sebagian kewenangan Rumah Tangga Provinsi (Desentralisasi) dalam bidang kearsipan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan kegiatan yang diterapkan oleh Gubernur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantu yang diberikan oleh pemerintah kepada Gubernur.

Visi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung yaitu Terwujudnya masyarakat lampung yang berbudaya, cerdas, dan sadar informasi serta terwujudnya tertib arsip di Provinsi Lampung.

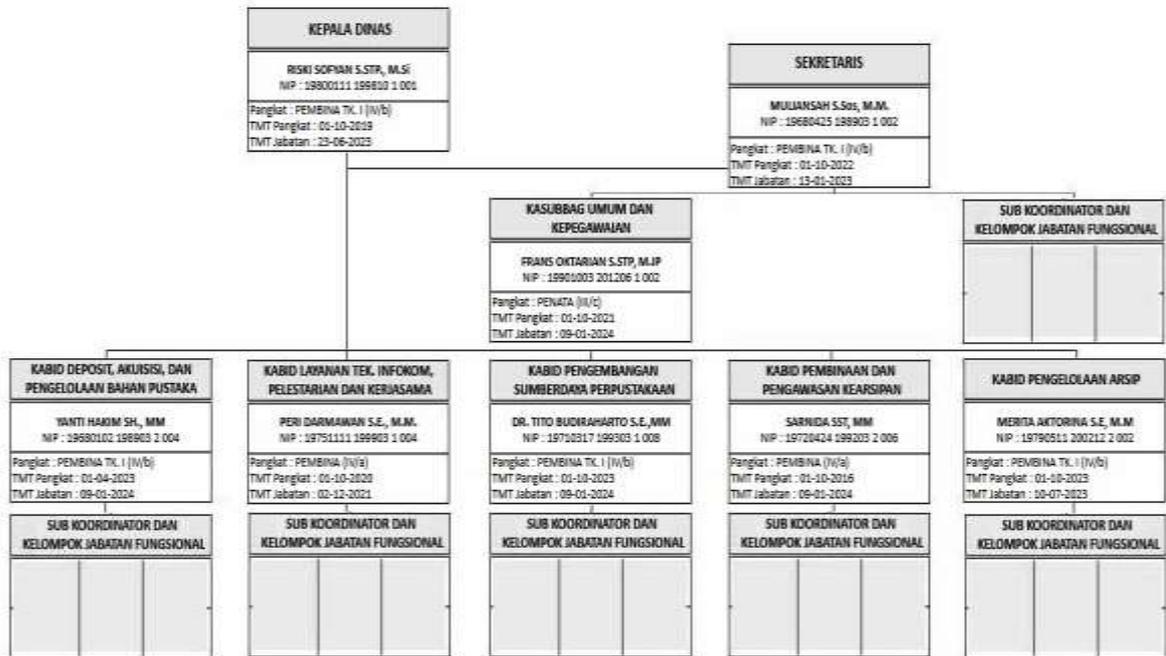
Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung yaitu :

- 1 Meningkatkan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pengembangan sistem dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- 2 Meningkatkan layanan perpustakaan dan informasi;
- 3 Melaksanakan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai sumber informasi dan bahan pertanggungjawaban serta pelestarian karya cetak dan karya rekam dan karya tulis hasil budaya bangsa;
- 4 Pengelolaan arsip dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan serta pengelolaan bahan pustaka guna mencerdaskan kehidupan bangsa.



Berikut Gambar Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung :

Gambar 1.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung



## 1.2 Tugas dan Fungsi

Tugas pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau organisasi. Tugas pokok memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut, sedangkan fungsi merupakan perwujudan tugas ke pemerintah di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan sertasaran pembangunan nasional, sehingga menjadi tugas pokok dan fungsi yang menjadi satu kesatuan yang saling terkait. Tugas pokok dalam suatu instansi sangat mempengaruhi kinerja yang akan dilaksanakan, dengan adanya tugas pokok tersebut suatu instansi dapat mengeluarkan aturan atau kebijakan yang berkaitan dengan urusan administrasi kepegawaian.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Provinsi Lampung. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Provinsi Lampung mempunyai Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu :

- 1 Perumusan kebijakan provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;
- 2 Penyusunan rencana dan program provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;
- 3 Pelaksanaan kerja sama dibidang perpustakaan dan Arsip, dengan lembaga lain;
- 4 Pelaksanaan pembinaan perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi (Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus);
- 5 Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi;
- 6 Pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan bahan perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
- 7 Pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan Jasa Kearsipan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan pengguna jasa Kearsipan;
- 8 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 9 Pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi daerah, katalog induk daerah, accessions list, indeks, bibliografi subjek, abstrak dan penyusunan literatur sekunder lainnya;
- 10 Pelaksanaan jasa layanan koleksi, dokumentasi, bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan perpustakaan;
- 11 Pelayanan publik di bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
- 12 Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap;
- 13 Pelaksanaan pengembangan minat baca;



- 14 Pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan koleksi khas Daerah(Karya Cetak Karya Rekam);
- 15 Pelaksanaan pelestarian;
- 16 Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
- 17 Pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK);
- 18 Pengelolaan perencanaan, kerjasama hukum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

a. Kepala Dinas

Tugas :

Membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pengembangan, pendayagunaan, pembinaan semua jenis perpustakaan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelestarian hasil budaya, menyelenggarakan pelayanan informasi ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan, menyelenggarakan perpustakaan umum daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya daerah masing-masing dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat, serta melaksanakan urusan kearsipan di lingkungan Provinsi Lampung.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;
- 2) Penyusunan rencana dan program provinsi di bidang pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan perpustakaan dan Kearsipan;
- 3) Pelaksanaan kerja sama dibidang perpustakaan dan Arsip, dengan lembaga lain;
- 4) Pelaksanaan pembinaan perpustakaan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi (Perpustakaan



- Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah dan Perpustakaan Khusus);
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Kearsipan yang pembinaannya menjadi kewenangan provinsi;
  - 6) Pelaksanaan seleksi, pengolahan, penyimpanan dan pelayanan bahan perpustakaan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
  - 7) Pelaksanaan pelayanan perpustakaan dan Jasa Kearsipan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka dan pengguna jasa Kearsipan;
  - 8) Pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
  - 9) Pelaksanaan penyusunan naskah bibliografi daerah, katalog induk daerah, accessions list, indeks, bibliografi subjek, abstrak dan penyusunan literatur sekunder lainnya;
  - 10) Pelaksanaan jasa layanan koleksi, dokumentasi, bahan rujukan, naskah, multimedia dan jaringan perpustakaan;
  - 11) Pelayanan publik di bidang perpustakaan dan Kearsipan;
  - 12) Pelaksanaan layanan perpustakaan keliling bagi daerah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap;
  - 13) Pelaksanaan pengembangan minat baca;
  - 14) Pelaksanaan pengelolaan dan pendayagunaan koleksi khas Daerah(Karya Cetak Karya Rekam);
  - 15) Pelaksanaan pelestarian;
  - 16) Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan;
  - 17) Pengembangan perpustakaan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi;
  - 18) Pengelolaan perencanaan, kerjasama hukum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan, serta umum.



b. Sekretariat

Tugas :

Pelayanan Teknis dan Administratif kepada semua unsur dilingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Lampung.

Fungsi :

- 1) Penyusunan perencanaan program dan anggaran, evaluasi monitoring dan pelaporan; penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, dan hubungan masyarakat;
- 2) penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan perlengkapan.
- 3) Mengembangkan Website dan Jaringan Internet
- 4) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi.

c. Bidang Deposit, Akuisisi, dan Pengolahan Bahan Perpustakaan

Tugas :

Menyelenggarakan pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dan penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah dan Pengembangan Bahan Pustaka.

Fungsi :

- 1) Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Deposit,
- 2) Pengelolaan KCKR, penyusunan bibliografi daerah dan katalog induk daerah;
- 3) Pelaksanaan pengembangan koleksi, pendistribusian bahan perpustakaan dan pengembangan koleksi Indonesia;
- 4) Pelaksanaan verifikasi bahan perpustakaan, katalogisasi, klasifikasi, dan pemasukan data ke pangkalan data.

d. Bidang Layanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pelestarian dan Kerjasama



Tugas :

Menyelenggarakan kegiatan yang berkenaan dengan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan layanan koleksi umum, rujukan, terjemahan dan konsultasi perpustakaan, bahan perpustakaan manuskrip, buku langka, dan audio visual;
- 2) Pengembangan otomasi perpustakaan, pengelolaan website dan jaringan internet;
- 3) Pelaksanaan pelestarian kandungan informasi bahan perpustakaan melalui alih media digital ke media baru, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
- 4) Pelaksanaan teknis konservasi dalam perawatan, perbaikan dan pengawetan bahan perpustakaan serta melakukan penjilidan bahan perpustakaan;
- 5) Penyimpanan bahan dan melakukan kerjasama semua jenis perpustakaan.

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

Tugas :

Memberikan bimbingan dan pembinaan pada semua jenis perpustakaan, melaksanakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, serta pengembangan Budaya Baca

Fungsi :

- 1) Pelaksanaan pemberian bimbingan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah di Wilayah Provinsi Lampung dan Perpustakaan Khusus meliputi Perpustakaan Lembaga Pemerintahan tingkat Provinsi (SKPD Provinsi dan BUMD Provinsi). Pengumpulan, Pengolahan dan Penyebaran informasi tentang Perpustakaan ;



- 2) Pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan, Koordinasi Pengembangan Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan, kemasyarakatan dan evaluasi pustakawan dan angka kreditnya;
- 3) Pelaksanaan Pengkajian , Pengumpulan, Pengolahan dan Penyebaran Informasi Budaya Baca serta Koodinasi dan Promosi Budya Baca.

f. Bidang Pembinaan Kearsipan

Tugas :

Pembinaan dan Pengawasan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat/Organisasi Politik serta Lembaga Pendidikan.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan;
- 2) Pembinaan dan pengawasan kearsipan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- 3) Pembinaan dan pengawasan kearsipan pada perusahaan, Ormas/Orpol, dan masyarakat; dan
- 4) Pembinaan dan pengawasan kearsipan pada lembaga pendidikan.

g. Bidang Pengelolaan Arsip

Tugas :

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan.

Fungsi :

- 1) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis serta layanan dan pemanfaatan kearsipan;
- 2) Pengelolaan Arsip vital dan asset nasional;
- 3) Pengelolaan arsip inaktif;



- 4) Pelaksanaan akuisisi arsip statis;
- 5) Pelaksanaan pengolahan arsip statis;
- 6) Pelaksanaan preservasi arsip statis;
- 7) Pelaksanaan layanan alih media dan reproduksi arsip dinamis dan arsip statis;
- 8) Pelaksanaan layanan informasi kearsipan;
- 9) Pelaksanaan pemanfaatan arsip statis; dan
- 10) Pelaksanaan Jasa Kearsipan ;
- 11) Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang bertugas pada masing-masing Bidang yang telah ditentukan. Adapun Sumber Daya Manusia yang ada pada Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung adalah sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.1  
Daftar Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS : 83	S3 : 1	IV : 21	8	75
L: 35	S2 : 22	III : 52		
P: 48	S1 : 37	II : 9		
	D4 : 0	I : 1		
PTHL : 9	D3 : 6			
L: 4	D2 : 1			
P: 5	D1 : 1			
	SLTA : 13			
	SLTP : -			
	SD : 2			

Sumber Data : Dinas Perpustakaan & Kearsipan Provinsi Lampung 2024

### 1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung



sebagai perangkat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan daerah.

Perpustakaan dan kearsipan telah ditetapkan dalam rumpun urusan yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, namun demikian perpustakaan dan kearsipan merupakan dua urusan pemerintahan wajib yang memiliki karakteristik permasalahan yang tidak sama. Oleh karena itu identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sebagai lembaga teknis daerah harus dilihat berdasarkan karakteristik masing - masing Pelaksanaan urusan perpustakaan masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain :

1. Kurangnya minat dan budaya baca dan budaya literasi masyarakat yang berbanding lurus dengan kurang memikatnya perpustakaan sebagai tempat yang menyenangkan;
2. Jumlah tenaga fungsional pustakawan masih kurang;
3. Jumlah bahan perpustakaan dan atau koleksi buku belum memenuhi Standar Perpustakaan Nasional;
4. Persentase serah simpan karya cetak dan karya rekam masih rendah;
5. Akses layanan perpustakaan belum efektif;
6. Pengembangan Perpustakaan Moderen perlu dilakukan inovasi berkelanjutan agar tidak ditinggalkan pemustaka.

Sementara Pelaksanaan dibidang urusan kearsipan juga masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan antara lain :

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah terhadap pengelolaan arsip;



2. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih kurang;
3. Di bidang Kearsipan, banyak arsip yang belum dikelola dengan baik di unit-unit kerja karena belum adanya tenaga fungsional arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan;
4. Belum semua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung sadar dan menyerahkan serta menitipkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan;
5. Penyelamatan arsip bernilai sejarah kurang intensif;
6. Perlindungan dan pengamanan terhadap arsip vital belum efektif;
7. Kurangnya pemanfaatan digitalisasi arsip/arsip digital (srikandi) pada pengelolaan administrasi persuratan di Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan dan Kearsipan.

#### **1.4 Dasar Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi PEMERINTAH (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;



15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Lapoan Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihaapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, Dasar Hukum, dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan Renstra Tahun 2019-2024, IKU Perubahan Renja Tahun 2024, Perubahan Renja Tahun 2024, Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran Evaluasi dan Analisis Capain Kinerja, Faktor Pendukung dan Penghambat, Solusi, Eisiensi dan Efektivitas sesuai periode Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, serta Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2024.

#### **BAB IV PENUTUP**

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntailitas Kinerja sesuai dengan periode Perubahan Renja seta Rekomendasi Kebijakan terhadap hasil kerja tahun berjalan dalam pencapaian kondisi akhir Tahun 2024.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **2.1 Perencanaan Strategis Perubahan Renstra 2019 -2024**

Visi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung menjadi modal dasar Provinsi Lampung menghadapi tantangan dalam 5 (lima) tahun ke depan dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia tahun 2005-2025. Pada Perubahan Renstra tahun 2019 -2024 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti Visi Gubernur Lampung yang terdapat didalam Perubahan RPJMD 2019 - 2024 Provinsi Lampung yaitu :

#### **“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA”**

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

- **Kehidupan masyarakat yang aman**

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tenteram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, sert tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada posisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.



- **Kehidupan masyarakat yang berbudaya**

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontra produktif terhadap pembangunan.

- **Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing**

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dan memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

- **Kehidupan yang sejahtera**

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Kesemua kondisi tersebut di atas adalah selaras dan mendukung untuk tercapainya visi yang telah digariskan melalui Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 yaitu **“LAMPUNG YANG MAJU DAN SEJAHTERA 2025”**.

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Provinsi Lampung tahun 2019-2024 dirumuskan enam misi sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan *“Good Governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.



3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung masuk ke dalam misi ke-2 (kedua) dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2024 Provinsi Lampung, yaitu **Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**

Berdasarkan Hasil Evaluasi Pemerintah Provinsi Lampung terhadap Indikator Kinerja, menyatakan bahwa terdapat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang belum memenuhi ketentuan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound*) dalam penentuan Indikator Kinerja Utama OPD, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung termasuk dalam OPD yang harus merubah Indikator Kinerja Utama OPD.

Tujuan adalah pernyataan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan. Tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Perubahan Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Tahun 2019 – 2024 ditetapkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi dari pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024. Berikut adalah Tabel Perubahan Tujuan dan Indikator Tujuan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.



Tabel 2.1.1  
Tabel Perubahan Tujuan dan Indikator Tujuan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

NO	SEBELUM PERUBAHAN				NO	SETELAH PERUBAHAN			
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal	TARGET TH KE 5		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	Kondisi Awal	TARGET TH KE 5
1	Menjadikan Pengelolaan Arsip sebagai Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi	Terciptanya sistem pelayanan Kearsipan yang Akuntabel	20%	40%	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	B	BB
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	30%	56%	2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	69,57	71,21

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Berdasarkan Tabel diatas, Tujuan Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung setelah perubahan Renstra adalah Meningkatkan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadi bagian *composite* dalam mengampu Tujuan tersebut. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan reformasi diperoleh melalui nilai reformasi birokrasi, pada Tahun 2024 Provinsi Lampung menargetkan nilai "**BB**" untuk penyelenggaraan Reformasi Birokrasi. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, Provinsi Lampung menargetkan Indeks IPM sebesar **71,21** pada Tahun 2024.

Sasaran Jangka Menengah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung setelah adanya Perubahan dan menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, yaitu Meningkatkan Budaya Gemar Membaca dengan Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Lampung dan Nilai Tingkat Gemar Membaca Provinsi Lampung. Serta Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dengan



indikator Nilai Digitalisasi Arsip Provinsi Lampung dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Lampung.

Berdasarkan hal tersebut, berikut disajikan Tabel Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024.



Tabel. 2.1.2  
Perubahan Sasaran, Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024.

NO	SEBELUM PERUBAHAN									NO	SETELAH PERUBAHAN								
	SASARAN	IKU	Relisasi 2023	TARGET DAN REALISASI							SASARAN	IKU	Realisasi 2023	TARGET DAN REALISASI					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024					2019	2020	2021	2022	2023	2024
				T	T	T	T	T	T					T	T	T	T	T	T
1	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Persentase Pengunjung Perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan	50,6	20	25	30	48,2	55,6	55,6	1	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	59,25	-	10,12	12,93	13,54	64,48	66,77
2	Meningkatnya tertib arsip statis	Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK	40	20	25	30	35	40	40	2	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat	Nilai Tingkat Gema Membaca (TGM)	66,38	-	53,63	55,74	59,52	63,90	66,77
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	Nilai Digitalisasi Arsip (TDGA)	89,27	-	-	-	-	85,51	88,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK)	86,51	-	-	-	-	87,00	87,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024



Dalam pencapaian sasaran strategis, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024 telah menargetkan capaian Indeks dan nilai dari indikator kinerja OPD. Pada sasaran kesatu, Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ditargetkan sebesar 66,77, dan Indikator Nilai Tingkat Gemar Membaca ditargetkan sebesar 66,77. Sedangkan sasaran kedua, Indikator Nilai Digitalisasi Arsip ditargetkan sebesar 88,00, dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan ditargetkan sebesar 87,00.

Secara konstektual dan konseptual, penyusunan kerangka strategi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung diorientasikan atas dasar pendekatan terhadap aspek internal dan aspek eksternal.

#### 1. Strategi Pendekatan Eksternal

Strategi ini digunakan untuk merespon permasalahan-permasalahan maupun isu-isu strategis yang ada dan disusun untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam mewujudkan:

- a. Peningkatan pelayanan perpustakaan;
- b. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat;
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat;
- d. Pengembangan perpustakaan desa/kelurahan;
- e. Peningkatan pengelolaan arsip daerah.

#### 2. Strategi Pendekatan Internal

Strategi ini diterapkan dalam mendukung pilihan strategi pendekatan eksternal di atas dirumuskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan) yang profesional dan terampil pada semua sektor dan lini akan mendukung terwujudnya pelayanan prima di bidang perpustakaan dan kearsipan kepada masyarakat.
- b. Peningkatan jumlah dan jenis koleksi perpustakaan akan dapat mendukung terwujudnya pengembangan minat dan budaya baca



- masyarakat serta pengembangan fasilitas perpustakaan berbasis teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Pengembangan perpustakaan berbasis IT melalui Program e-library membangun pangkalan Data ( *Data Base*), peningkatan fasilitas dan prasarana berbasis IT, membangun layanan masyarakat secara *on-line*.
  - d. Meningkatkan kesadaran pentingnya kearsipan dengan membangun sistem kendali kearsipan.
  - e. Mengembangkan sistem partisipasi aktif masyarakat pengguna melalui kerjasama kunjungan dan komunitas pembaca serta apresiasi.
  - f. Sosialisasi dan promosi, serta membangun media publikasi hasil-hasil pembangunan daerah melalui pameran dokumentasi capaian daerah.
  - g. Membangun komitmen bersama dengan *stake holder* melalui MOU.
  - h. Peningkatan penyelenggaraan kearsipan di seluruh Perangkat Daerah melalui sosialisasi, supervise, pembinaan, monitoring dan evaluasi akan mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean governance*(penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih) di Provinsi Lampung.

Kebijakan yang ditetapkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung adalah :

1. Memfasilitasi pegawai dan tenaga pengelola perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis perpustakaan dan kearsipan.
2. Membangun fasilitas e-library dan kearsipan elektronik pada Dinas Perpustakaan dan KearsipanProvinsi Lampung Berbasis Website (termasuk Jaringan Informasi Kearsipan Nasional).
3. Pengembangan sarana dan prasarana, serta koleksi perpustakaan dan kearsipan.
4. Mengadakan/mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan aplikasi teknologi informasi.
5. Menyediakan fasilitas Wi-fi, hot-spot, audio-visual, diorama, sarana dan prasarana bermain/rekreasi, cafe, tempat ibadah, dll.



6. Menetapkan standar standar pelayanan perpustakaan dan pengendalian kearsipan.
7. Membentuk komunitas pemustaka dan penerbit (pemerintah/swasta), dan memberikan apresiasi bagi yang berkontribusi terbaik dalam bentuk kegiatan “Perpustakaan Award”.
8. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) Dewan Perpustakaan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
9. Menerbitkan bulletin, majalah, dan jurnal ilmiah.
10. Menyelenggarakan promosi melalui media, pameran dan dokumentasi yang ada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.
11. Menyelenggarakan sosialisasi, pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
12. Menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan stakeholder (IPI, Perguruan Tinggi, Ikatan Penerbit, MPU, dll).
13. Menghimpun, mendokumentasikan, dan melestarikan hasil karya budaya dan citra arsip daerah dalam bentuk konten lokal Lampung.
14. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
15. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
16. Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Nomor 800.1/1119.a/V.18/2024 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Tahun 2024 adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Nilai Tingkat Gemar Membaca, Nilai Digitalisasi Arsip, dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.



Tabel 2.2.1  
Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		
				SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	SKPD
LAMA	BARU	LAMA	BARU	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di masyarakat	Persentase Pengunjung Perpustakaan yang Menjadi anggota perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	<p><b>Makna Indikator</b> : Indikator ini dipilih untuk memantau perkembangan jumlah pengunjung perpustakaan Daerah Provinsi dan mempersentasikan jumlah anggota perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : untuk mengukur peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan di provinsi serta untuk mengetahui jumlah anggota perpustakaan Daerah Provinsi Lampung.</p> <p><b>Rumus Perhitungan:</b></p> $\frac{\sum \text{pengunjung yang menjadi anggota}}{\sum \text{Pengunjung Perpustakaan}} \times 100\%$	<p><b>Makna Indikator</b> : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah instrument pengukuran tingkat pembangunan yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah alat yang penting untuk mengevaluasi dan mendorong peningkatan literasi masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, IPLM tidak hanya mengukur kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga literasi digital, sosial, dan budaya.</p> <p><b>Rumus Perhitungan:</b></p> $IPLM = \frac{\sum UPLM}{\sum AM} \times 100\%$ <p>UPLM<sub>i</sub> adalah variable komponen pembentuk indeks dari unsur pembangun literasi masyarakat mulai dari UPLM<sub>1</sub>, sampai dengan UPLM<sub>7</sub></p> <p>AM adalah jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan</p>	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



			Nilai Tingkat Kegemaran Membaca/TGM		<p><b>Makna Indikator</b> : Nilai Tingkat Kegemaran membaca masyarakat adalah perilaku atau kebiasaan dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu.</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : untuk mengkaji dan mengidentifikasi tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia untuk merumuskan kebijakan pengembangan perpustakaan umum dan pengembangan kebudayaan gemar membaca.</p> <p><b>Rumus Perhitungan:</b></p> $\text{TingkatGemarMembaca} = 0,3(TFM + TDM + TJB) + 0,05 (FAI + DAI)$ <p>Keterangan:  TFM : Tingkat Frekuensi Membaca  TDM : Tingkat Durasi Membaca  TJB : Tingkat Jumlah Bahan Bacaan  FAI : Frekuensi Akses Internet  DAI : Durasi Akses Internet</p>	
Meningkatnya Arsip Tertata	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK	Nilai Digitalisasi Arsip(TDGA)	<p><b>Makna Indikator</b> : Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah arsip yang di filekan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : untuk mengukur peningkatan jumlah arsip yang difilekan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada Perangkat Daerah sehingga penyelenggaraan Pengelolaan Kearsipan menjadi lebih baik</p>	<p><b>Makna Indikator</b> : Digitalisasi adalah proses perubahan arsip non elektronik atau pun arsip elektronik berbasis analog ke bentuk digital, Dengan kata lain, digitalisasi mengambil proses analog dan mengubahnya ke bentuk digital tanpa perubahan yang berbeda pada proses itu sendiri.</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> : Digitalisasi sangat penting untuk pemrosesan, penyimpanan, dan transmisi data, memungkinkan informasi dari semua jenis dalam semua format dengan sangat efisien, data digital berpotensi untuk lebih mudah dibagikan dengan mengubah dokumen fisik menjadi berkas digital, dapat</p>	



mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan fisik yang dapat menghemat biaya penyimpanan.

**Rumus Perhitungan:**

		Formulasi nilai digitalisasi arsip	
1	Nilai Aksesibilitas	$\frac{\text{Jumlah pengguna yang dapat mengakses arsip digital}}{\text{Jumlah total pengguna}} \times 100$	
2	Nilai Keamanan	$\frac{\text{Jumlah arsip yang dilindungi dari kerusakan atau kehilangan}}{\text{Jumlah total arsip}} \times 100$	
3	Nilai Efisiensi	$\frac{\text{Waktu yang dibesat dengan menggunakan arsip digital}}{\text{Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip manual}} \times 100$	
4	Nilai Kualitas	$\frac{\text{Jumlah arsip yang memiliki kualitas yang baik}}{\text{Jumlah total arsip}} \times 100$	
5	Nilai Ekonomi	$\frac{\text{Biaya yang dibesat dengan menggunakan arsip digital}}{\text{Biaya yang dibutuhkan untuk mengelola arsip manual}} \times 100$	



			<p>Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan/ NHPK</p>		<p><b>Makna Indikator</b> : Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.</p> <p><b>Alasan Pemilihan</b> dalam upaya untuk menyelamatkan arsip perlu mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip,kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangundangan;</p> <p><b>Rumus Perhitungan:</b></p> <p>40% NHP Internal + 60% NHP Eksternal</p> <p>Keterangan Aspek/Komponen Eksternal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aspek Kebijakan</li> <li>2. Aspek Pembinaan</li> <li>3. Aspek Pengelolaan Asip Inaktif dengan Retensi sekurang-kurangnya 10 tahun</li> <li>4. Aspek Pengelolaan Arsip Statis</li> <li>5. Apek Sumbe Daya Karsipan</li> </ol> <table border="1" data-bbox="1386 826 1944 1114"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>ASPEK/KOMPONEN</th> <th>NILAI STANDAR</th> <th>NILAI</th> <th>BOBOT ASPEK (%)</th> <th>NILAI AKHIR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>ASPEK KEBIJAKAN</td> <td>1100</td> <td>1040</td> <td>15%</td> <td>14,18</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>ASPEK PEMBINAAN</td> <td>2000</td> <td>1540</td> <td>25%</td> <td>19,25</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN</td> <td>800</td> <td>800</td> <td>10%</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS</td> <td>2300</td> <td>2200</td> <td>30%</td> <td>28,70</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN</td> <td>2400</td> <td>2080</td> <td>20%</td> <td>17,33</td> </tr> <tr> <td colspan="5">TOTAL NILAI/NILAI STANDAR/ NILAI AKHIR</td> <td>8680</td> <td>7660</td> <td>100%</td> <td>89,46</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="3">A (MEMUASKAN)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan Aspek/Komponen Internal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Arsip Dinamis</li> <li>2. Sumber Daya Kearsipan</li> </ol>	NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT ASPEK (%)	NILAI AKHIR	1.	ASPEK KEBIJAKAN	1100	1040	15%	14,18	2.	ASPEK PEMBINAAN	2000	1540	25%	19,25	3.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	800	800	10%	10,00	4.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2300	2200	30%	28,70	5.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	2400	2080	20%	17,33	TOTAL NILAI/NILAI STANDAR/ NILAI AKHIR					8680	7660	100%	89,46						A (MEMUASKAN)			
NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT ASPEK (%)	NILAI AKHIR																																																						
1.	ASPEK KEBIJAKAN	1100	1040	15%	14,18																																																						
2.	ASPEK PEMBINAAN	2000	1540	25%	19,25																																																						
3.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANG-KURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	800	800	10%	10,00																																																						
4.	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2300	2200	30%	28,70																																																						
5.	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	2400	2080	20%	17,33																																																						
TOTAL NILAI/NILAI STANDAR/ NILAI AKHIR					8680	7660	100%	89,46																																																			
					A (MEMUASKAN)																																																						



Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah instrument pengukuran tingkat pembangunan yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang bersumber dari data sekunder dan aspek-aspek masyarakat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Berikut Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja (IPLM) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Berdasarkan tabel diatas, formulasi Indeks Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM) didapat dari beberapa variabel, yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan, Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan, Anggota Perpustakaan.

Berdasarkan Tabel diatas, Nilai Tingkat Gemar Membaca didapat dari beberapa variabel, yaitu Frekuensi Membaca, Durasi Membaca, Jumlah Buku yang dibaca, Frekuensi Akses Internet, Durasi Akses Internet.

Digitalisasi Arsip merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Digitalisasi Arsip yang dilakukan merupakan alih media/ perubahan wujud fisik arsip konvensional menjadi arsip elektronik atau dinamakan alih media. Digitalisasi adalah proses perubahan arsip non elektronik atau pun arsip elektronik berbasis analog ke bentuk digital, Dengan kata lain, digitalisasi mengambil proses analog dan mengubahnya ke bentuk digital tanpa perubahan yang berbeda pada proses itu sendiri. Formulasi indeks digitalisasi arsip didapat dari beberapa variable, yaitu Aksesibilitas, Keamanan, Efisiensi, Kualitas, dan Ekonomi.



Pengawasan Kearsipan Adalah Proses Kegiatan Dalam Menilai Kesesuaian Antara Prinsip, Kaidah, Dan Standar Kearsipan Dengan Penyelenggaraan Kearsipan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Pengawasan terdiri dari pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Berdasarkan Sasaran Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, ditampilkan Indikator Kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Berdasarkan Tabel diatas, penghitungan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK) diperoleh Penjumlahan Nilai Pengawasan Eksternal dan Internal. Untuk Pengawasan Eksternal terdiri dari beberapa variabel, yaitu Kebijakan Kearsipan, Pembinaan Kearsipan, Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun, Pengelolaan Arsip Statis, Sumber Daya Kearsipan mencakup Organisasi, SDM kearsipan, Sarana dan Prasarana, dan Pendanaan.

Aspek atau Komponen Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan juga bersumber dari nilai hasil pengawasan kearsipan internal (ASKI) yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Daerah terhadap unit pengolah dan unit kearsipan tiap perangkat daerah/entitas Pemerintah provinsi dan diverifikasi oleh ANRI. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal diperoleh dari penilaian atas Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip dan penilaian atas Sumber Daya Kearsipan meliputi SDM kearsipan dan Prasarana dan sarana kearsipan.

### **2.3 Perubahan Renja 2024**

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjabarkan secara operasional ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja.



Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menetapkan rencana program pada Perubahan Renja 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pembinaan Perpustakaan
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
4. Program Pengelolaan Arsip

Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung meliputi:

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  2. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Penyediaan Bahan /Material
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrik
  2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Program yang terkait dengan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi meliputi:

### **1. Program Pembinaan Perpustakaan**

- a. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
  1. Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
  2. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi
  3. Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
  4. Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- b. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
  1. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
  2. Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial

### **2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno**

- a. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi
  1. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam



- b. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah
  - 1. Penerbitan Katalog Induk Daerah

### **3. Program Pengelolaan Arsip**

- a. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
  - 1. Penyusutan Arsip Dinamis
  - 2. Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis
- b. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
  - 1. Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI
  - 2. Akuisisi Arsip Statis
- c. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
  - 1. Penyediaan Informasi Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN
  - 2. Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi

#### **2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan 2024**

Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan oleh karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan



Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2024, dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menetapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung sebagai berikut :

Gambar 2.4.1  
Keputusan Gubernur Lampung Tentang Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024



PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Umum	
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	



Tabel 2.4.1  
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Budaya Gemar membaca di Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM)	66,7
		Nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM)	66,77
2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	Nilai Digitalisasi Arsip	88,00
		Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK)	87,00

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Tentang Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024 memiliki 2 (dua) sasaran strategis, dan 4 (empat) Indikator Kinerja. Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat memiliki target kinerja sebesar 66,77, dan Nilai Tingkat Gemar Membaca memiliki target kinerja 66,77, untuk indikator Nilai Digitalisasi Arsip memiliki target kinerja sebesar 88,00, serta Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan memiliki target kinerja sebesar 87,00.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 memperoleh Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.780.520.721,85. Berdasarkan alokasi Pagu Anggaran yang ada, maka untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan indikator Tingkat Gemar Membaca memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 16.106.503.095,85, dan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Nilai Digitalisasi Arsip dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 674.017.626,-.

Tabel 2.4.2  
Tabel Pagu Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	KET
<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) DAN NILAI TINGKAT GEMAR MEMBACA (TGM)</b>	<b>16.106.503.095,85</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>15.028.506.596</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja</b>	<b>71.396.645,89</b>	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.609.645,89	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	25.787.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>11.718.453.141</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.644.890.140,85	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	33.563.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	40.000.000	
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>30.000.000</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	15.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	15.000.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.000.000</b>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	10.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.152.119.410,11</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	14.943.947,11	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	350.846.788,00	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	162.232.000,00	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	
Penyediaan Bahan / Material	60.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	83.600.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	460.496.675,00	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.391.500.399,00</b>	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	649.600.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	741.900.399,00	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</b>	<b>655.037.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	647.037.000,00	
Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya	8.000.000	
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>	<b>954.478.000</b>	
<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>670.398.000</b>	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan	161.816.000	



INDIKATOR KINERJA UTAMA	ANGGARAN	KET
Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Provinsi	43.466.000	
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	245.116.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	220.000.000	
<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>284.080.000</b>	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	215.000.000,00	
Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	69.080.000	
<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN</b>	<b>123.518.500</b>	
<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di</b>	<b>70.796.500</b>	
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak	70.796.500	
<b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografr Daerah</b>	<b>52.722.000</b>	
Penerbitan Katalog Induk Daerah	52.722.000	
<b>NILAI DIGITALISASI ARSIP DAN NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN (NHPK)</b>	<b>674.017.626</b>	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>	<b>674.017.626</b>	
<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>	<b>56.441.000</b>	
Penyusutan Arsip Dinamis	25.105.000	
Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	31.336.000	
<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>	<b>157.379.000</b>	
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	84.340.000	
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	73.039.000	
<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi</b>	<b>460.197.626</b>	
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	30.000.000	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga	430.197.626	
<b>JUMLAH</b>	<b>16.780.520.721,85</b>	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

## 2.5. Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024

Dokumen keselarasan perencanaan adalah kesesuaian antara dokumen perencanaan satu dengan dokumen perencanaan lainnya mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah. Keselarasan ini penting diperhatikan untuk menilai kinerja pemerintah daerah.



Tabel 2.5.1  
Keselarasan Dokumen Perencanaan Tahun 2024  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Target			Ket
			Perubahan Renstra 2019-2024	Perubahan Renja 2024	Perubahan PK 2024	
1	Persentase Pengunjung yang menjadi anggota Perpustakaan	50,39	55,6	-	-	Berdasarkan Arahan Tim Evaluator KemenpanRB
2	Persentase arsip yang difilekan berbasis TIK	40	40	-	-	
3	Indek Pembangunan Literasi masyarakat (IPLM)	59,25	-	66,77	66,77	
4	Nilai Tingkat Gemar Membaca (TGM)	67,67	-	66,77	66,77	
5	Nilai Digitalisasi Arsip	89,27	-	88,00	88,00	
6	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan(NHPK)	86,51	-	87,00	87,00	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

Realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar 59,25, dan realisasi Nilai Tingkat Gemar Membaca adalah 67,67. Nilai Digitalisasi Arsip Tahun 2023 terealisasi sebesar 89,27 serta Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan terealisasi sebesar 86,51. Target perubahan Perjanjian Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 adalah 66,77 untuk indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, 66,77 untuk Nilai Tingkat Gemar Membaca, dan 88,00 untuk indikator Nilai Digitalisasi Arsip, serta 87,00 untuk Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Tabel 2.5.2  
Program Unggulan Tahun 2024  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

IKU 2024	Program Unggulan dan Inovasi
IPLM dan TGM	1. e-perpus 2. POCADI 3. Titik Baca
Nilai Digitalisasi Arsip dan NHPK	1. SRIKANDI

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024



Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung melaksanakan beberapa Program Unggulan pada Tahun 2024, beberapa diantaranya merupakan aplikasi hasil implementasi inovasi terkait bidang pelayanan perpustakaan yaitu e-Perpus, Pojok Baca Digital (POCADI), Titik Baca, dan di bidang kearsipan terdapat Srikandi yang merupakan program Pemerintah Pusat dalam pengarsipan surat menyurat yang diterapkan di Lingkungan Provinsi Lampung.



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor : 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019 -2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Pengukuran kinerja dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja



dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Renstra 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024, berdasarkan hasil reviu maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) Indikator tujuan, serta 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja utama (out comes). Berikut adalah Tabel Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.



Tabel 3.1.1  
Tabel Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama Sebelum dan Sesudah Perubahan  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024

(1) sebelum perubahan

SEBELUM PERUBAHAN																					
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET /REALISASI			SASARAN	IKU	Realisasi 2023	TARGET /REALISASI												
			2024						2019		2020		2021		2022		2023		2024		
			T	R	C				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	C
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	56%	56%	100%	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Persentase Pengunjung Perpustakaan yang menjadi anggota perpustakaan	50,6	20	18	25	24,76	30	28,72	48,2	47.39	55,6	50,6	55,6	54,5	98,02
2	Menjadikan Pengelolaan Arsip sebagai Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi	Terciptanya sistem pelayanan Kearsipan yang Akuntabel	40%	40%	100%	Meningkatnya tertib arsip statis	Persentase Arsip yang difilekan berbasis TIK	40	20	18	25	24,76	30	28,72	35	35	40	40	40	40	100



(2) setelah perubahan

SESUDAH PERUBAHAN																					
NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET /REALISASI			SASARAN	IKU	Realisasi 2023	TARGET /REALISASI												
			2024						2019		2020		2021		2022		2023		2024		
			T	R	C				T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	C
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks pembangunan manusia (IPM)	71,21	73,13	102,70%	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	59,25	-	-	10,1	11,98	12,9	10,72	13,5	59,99	64,48	59,25	66,77	64,81	97,06%
						Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat	Nilai Tingkat Gema Membaca (TGM)	66,38	-	-	53,63	61,48	55,74	62,44	59,52	64,19	63,9	66,38	66,77	67,67	101,35%
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	-	-	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	Nilai Digitalisasi Arsip (TDGA)	89,27	-	-	-	-	-	-	-	-	85,51	89,3	88	87,6	99,58%
						Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	Nilai Hasil Pengawasa Kearsipan (NHPK)	86,51	-	-	-	-	-	38,61	-	69,02	87	86,5	87	86,2	99,11%



### 3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam memantapkan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Aparatur yang lebih bersih, professional, akuntabel, dan berdedikasi tinggi dan mendukung peningkatan pembangunan manusia Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung berupaya untuk menyelenggarakan pelayanan Perpustakaan yang berkualitas, maka dirumuskan lah tujuan dan sasaran oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung yang hendak dicapai, tujuan tersebut sesuai dengan misi Gubernur Lampung, yaitu misi ke 2 yaitu **Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.**

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2019–2024 sebanyak 2 (dua) sasaran, yaitu sasaran ke-1 (kesatu), **Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat** dengan **Indikator Kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Gemar Membaca**. Sasaran ke-2 (kedua), **Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital** dengan **Indikator Kinerja Nilai Digitalisasi Arsip dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.**

Analisis pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung tahun 2024 berdasarkan Sasaran ke-1 (kesatu) **“Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat”** memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut:



## 1. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Kemampuan literasi bukan sebatas bisa baca-tulis namun Literasi adalah kecakapan. Setidaknya ada empat tingkatan literasi yang dijadikan parameter kemajuan yaitu Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan ataupun informasi yang bermutu. Kedua, kemampuan memaknai yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide-ide, gagasan, inovasi, ataupun kreativitas baru. Keempat, literasi adalah kemampuan menciptakan barang/jasa untuk khalayak. Analisis pengukuran capaian **Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat** Provinsi Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1  
Pencapaian Sasaran dengan Indikator IPLM

Sasaran 1						
Sasaran 1	Meningkatnya Budaya Gemar Membacadi Masyarakat					
IKU	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat					
Satuan	Angka					
Capaian Indeks Pembangunan iterasi MasarakatProvinsi Lampung Tahun 2019-2024						
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Nasonal	Grafik Pencapaian IPLM Pemprov Lampung:
1	2019	n/a	n/a	n/a	n/a	
2	2020	10,12	11,98	118,38%	12,93	
3	2021	12,93	10,72	82,91%	13,54	
4	2022	13,54	59,99	443,06%	64,48	
5	2023	64,48	59,25	91,89%	69,42	
6	2024	66,77	64,81	97,06%	73,52	

Sasaran Meningkatkan Budaya Gemar Membacadi Masyarakat memiliki indikator yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan capaian sebesar **64,81** dari target sebesar **66,77** yang direncanakan **dalam**



**perubahan perjanjian kinerja tahun 2024.** Berdasarkan target tersebut persentase capaian kerjanya adalah **97,06%**. Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat terlihat dinamis setiap tahunnya dengan capaian kinerja sebagai berikut: pada tahun 2020 mencapai **118,38%**, **2021** mencapai **82,91%**, **2022** mencapai **443,06%**, **2023** mencapai **91,89%** dan **2024** mencapai **97,0%** dengan kategori **Sedang** dalam skala Nasional.

Tabel 3.2.2  
Capaian Sasaran dengan indikator IPLM (2024 – Nasional)

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat	
IKU	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
Satuan	Angka	
	2024	Nasional
	Target	Capaian
	66,77	97,06
		73,52

Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja akhir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2024 yaitu 64,81. Dengan demikian, realisasi Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Lampung lebih rendah 8,71 poin dari realisasi Nasional.

Berdasarkan Tabel Perbandingan Nilai IPLM Provinsi Lampung Tahun 2024 terhadap rata-rata IPLM seluruh Provinsi di Indonesia dapat disimpulkan bahwa Provinsi Lampung berada pada urutan **ke-8 (delapan)** Nasional pada tahun 2024.

Tabel 3.2.3  
Nilai IPLM Provinsi Lampung Tahun 2024  
berdasarkan rata-rata IPLM seluruh Provinsi di Indonesia

No	Provinsi	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM PROV	Kategori
1	Aceh	0,3212	0,3815	1,0000	0,3666	1,0000	1,0000	1,0000	72,42	Sedang
2	Sumatra Utara	0,3606	0,3534	0,4325	0,2211	1,0000	1,0000	1,0000	62,39	Sedang
3	Sumatra Barat	0,6070	0,7438	1,0000	0,4221	1,0000	1,0000	1,0000	82,47	Tinggi
4	Riau	0,3503	0,4176	1,0000	0,0787	1,0000	1,0000	1,0000	69,24	Sedang
5	Jambi	0,4543	0,2781	0,5117	0,3362	1,0000	1,0000	1,0000	65,43	Sedang



No	Provinsi	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM PROV	Kategori
6	SumatraSelatan	0,4531	0,4186	0,9210	0,2643	1,0000	1,0000	1,0000	72,24	Sedang
7	Bengkulu	0,6097	0,2859	0,4734	0,2481	1,0000	1,0000	1,0000	65,96	Sedang
8	Lampung	0,4260	0,5423	0,4112	0,1568	1,0000	1,0000	1,0000	64,81	Sedang
9	Kepulauan BangkaBelitung	0,7356	0,8483	1,0000	0,3371	1,0000	1,0000	1,0000	84,59	Tinggi
10	Kepulauan Riau	0,6712	0,4634	0,8420	0,2200	1,0000	1,0000	1,0000	74,24	Sedang
11	DKIJakarta	0,6047	0,1685	0,3418	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	73,07	Sedang
12	JawaBarat	0,5236	0,2746	0,9023	0,3930	1,0000	1,0000	1,0000	72,76	Sedang
13	JawaTengah	0,5946	0,3576	0,5914	0,3962	1,0000	1,0000	1,0000	70,57	Sedang
14	DI Yogyakarta	0,7625	0,7742	1,0000	0,5106	1,0000	1,0000	1,0000	86,39	Tinggi
15	JawaTimur	0,3809	0,3951	0,7258	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	78,60	Sedang
16	Banten	0,3197	0,1320	0,2760	0,6042	1,0000	1,0000	1,0000	61,88	Sedang
17	Bali	0,6813	0,2980	0,4603	0,1836	1,0000	1,0000	1,0000	66,05	Sedang
18	NusaTenggaraBarat	0,3673	0,2031	0,6924	0,1668	1,0000	0,7998	1,0000	60,42	Sedang
19	NusaTenggara Timur	0,4189	0,3863	0,4480	0,1301	1,0000	1,0000	1,0000	62,62	Sedang
20	KalimantanBarat	0,5361	0,5984	0,7638	0,3620	1,0000	1,0000	1,0000	75,15	Sedang
21	Kalimantan Tengah	0,3637	0,4444	1,0000	0,2670	1,0000	1,0000	1,0000	72,50	Sedang
22	KalimantanSelatan	0,6250	0,6683	1,0000	0,3878	1,0000	1,0000	1,0000	81,16	Tinggi
23	Kalimantan Timur	0,5953	0,6230	0,9432	0,3222	1,0000	1,0000	1,0000	78,34	Sedang
24	KalimantanUtara	0,2972	0,2787	1,0000	0,0953	1,0000	1,0000	1,0000	66,73	Sedang
25	Sulawesi Utara	0,4065	0,2356	0,4214	0,3141	1,0000	1,0000	1,0000	62,54	Sedang
26	SulawesiTengah	0,4278	0,4169	0,6682	0,5062	1,0000	1,0000	1,0000	71,70	Sedang
27	Sulawesi Selatan	0,5404	0,7668	1,0000	0,8694	1,0000	1,0000	1,0000	88,24	Tinggi
28	SulawesiTenggara	0,4904	0,5213	0,8758	0,1744	1,0000	1,0000	1,0000	72,31	Sedang
29	Gorontalo	0,4969	0,3654	1,0000	0,5600	1,0000	1,0000	1,0000	77,46	Sedang
30	SulawesiBarat	0,3344	0,4045	1,0000	0,0940	1,0000	0,6228	1,0000	63,65	Sedang
31	Maluku	0,3501	0,1791	0,4088	0,1603	1,0000	1,0000	1,0000	58,55	Sedang
32	MalukuUtara	0,3139	0,2544	0,5590	0,4302	0,7613	1,0000	1,0000	61,70	Sedang
33	Papua	0,2049	0,2217	0,5682	0,2573	1,0000	1,0000	1,0000	60,75	Sedang



No	Provinsi	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	IPLM PROV	Kategori
34	PapuaBaratDaya	0,1619	0,1838	0,3885	0,0556	1,0000	1,0000	1,0000	54,14	Sedang
35	Papua Pegunungan	0,0264	0,0333	0,0121	0,0376	1,0000	1,0000	0,3581	35,25	Rendah
36	Papua Barat	0,1957	0,5987	0,7155	0,1002	1,0000	1,0000	1,0000	65,86	Sedang
37	PapuaTengah	0,1165	0,0937	0,1342	0,0806	1,0000	1,0000	1,0000	48,93	Rendah
38	PapuaSelatan	0,0843	0,1102	0,1216	0,1685	1,0000	1,0000	1,0000	49,78	Rendah

Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dengan nilai IPLM pada Perpustakaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.4  
 Nilai IPLM Provinsi Lampung Tahun 2024  
 berdasarkan rata-rata IPLM seluruh Kab/Kota di Provinsi Lampung

PROVINSI/KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>0,4260</b>	<b>0,5423</b>	<b>0,4112</b>	<b>0,1568</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>64,81</b>
Kab. Lampung Barat	1,0000	0,1593	0,5121	0,3799	1,0000	1,0000	0,7290	68,29
Kab. Lampung Selatan	0,3026	0,7962	0,1267	0,0319	1,0000	1,0000	1,0000	60,82
Kab. Lampung Tengah	0,2221	0,0710	0,0779	0,0093	1,0000	1,0000	1,0000	48,29
Kab. Lampung Timur	0,2419	0,2789	0,1685	0,0276	1,0000	0,5671	0,8735	45,11
Kab. Lampung Utara	0,2033	0,6347	0,3976	0,2180	1,0000	0,5373	1,0000	57,01
Kab. Mesuji	0,5823	0,2809	0,1156	0,6249	1,0000	0,6220	1,0000	60,37
Kab. Pesawaran	0,4310	0,0805	0,5766	0,0235	1,0000	0,6568	1,0000	53,83
Kab. Pringsewu	0,2873	0,1455	0,2026	0,5824	1,0000	1,0000	1,0000	60,25
Kab. Tanggamus	0,7968	0,1279	0,2679	0,1869	1,0000	1,0000	1,0000	62,57
Kab. Tulang Bawang	0,4865	0,0500	0,4156	0,2952	1,0000	1,0000	1,0000	60,68
Kab. Tulang Bawang Barat	0,3974	1,0000	1,0000	0,2203	1,0000	1,0000	1,0000	80,25
Kab. Way Kanan	0,2886	0,5538	0,3920	0,1404	1,0000	1,0000	1,0000	62,50
Kota Bandar Lampung	0,7524	1,0000	0,5636	0,0561	1,0000	1,0000	1,0000	76,74
Kota Metro	0,7982	0,8104	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	94,41

Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Berdasarkan tabel diatas pencapaian IPLM Provinsi Lampung sebesar 64,81 masuk dalam kategori sedang. Tiga Kabupaten/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Metro sebesar 94,41, Kabupaten Tulang Bawang Barat 80,25 dan Kota Bandar Lampung 76,74. Sedangkan tiga Kabupaten /Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu, Kabupaten Lampung Timur sebesar 45,11, Kabupaten Lampung Tengah 48,29, dan Kabupaten Pesawaran 53,83.

Gambar 3.2.1



Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Pada dasarnya dalam meningkatkan sasaran Budaya Gemar Membaca di Masyarakat di Provinsi Lampung dapat diwujudkan melalui Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang meliputi beberapa komponen/unsur, yaitu sebagai berikut:



Gambar 3.2.2  
Indikator IPLM Tahun 2024

NO	INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN	NILAI	INTERPRETASI
<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT</b>		<b>64,81</b>	<b>Sedang</b>
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,4260	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 43 persen dari standar
2	Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2)	0,5423	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 54 persen dari standar
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,4112	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 41 persen dari standar
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4)	0,1568	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 16 persen dari standar
5	Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5)	1,0000	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar
6	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	1,0000	Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
<b>Keterangan Standar:</b>			
UPLM1: Jumlah kelembagaan		UPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaan	
UPLM2: 2 x jumlah penduduk		UPLM6: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 penduduk		UPLM7: 2% dari jumlah penduduk	
UPLM4: 2% dari jumlah penduduk			
<b>Jumlah Penduduk (BPS 2022)</b>		<b>9.313.990</b>	
<b>Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022)</b>		<b>1.868.610</b>	
<b>Jumlah Civitas Akademika (BPS 2022)</b>		<b>200.432</b>	
<b>Jumlah Kelembagaan (BPS 2022)</b>		<b>12.455</b>	

Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IndeksIPLM terdiri atas beberapa Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Perpustakaan yang di bina sesuai SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan, dan Anggota Perpustakaan. Berikut adalah Tabel Rekapitulasi UPLM Provinsi Lampung beserta penjelasannya.

Tabel 3.2.5  
Rekapitulasi UPLM Provinsi Lampung Tahun 2024

No	UPLM Provinsi Lampung	Realisasi Nilai UPLM Provinsi Lampung	Standar Nilai UPLM	Capaian Nilai UPLM Provinsi Lampung	ket.
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1)	5335 Perpustakaan	7149 perpustakaan	0,42	masih perlu ditingkatan
2	Ketercukupan Koleksi (UPLM 2)	5.455.465 koleksi	10.102.713 koleksi	0,54	masih perlu ditingkatan
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)	1532 tenaga perpustakaan ( 1 tenaga perpustakaan melayani 6.080 orang)	3726 tenaga perpustakaan ( 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 orang)	0,41	masih perlu ditingkatan
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan (UPLM 4)	29.211 pengunjung	186.280 pengunjung	0,15	masih perlu ditingkatan
5	Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5)	3.502 perpustakaan	1.195 perpustakaan	1	telah memenuhi standar
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan (UPLM 6)	3.920.922 orang	186.280 orang	1	telah memenuhi standar
7	Anggota Perpustakaan (UPLM 7)	1.600.778 anggota	186.280 anggota	1	telah memenuhi standar

Sumber: *Perpunas RI, Desember 2024*

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat nilai dari masing-masing Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat di Provinsi Lampung, yang meliputi:

#### A. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menjamin akses layanan perpustakaan bagi seluruh masyarakat. Pada Tahun 2024 pencapaian layanan Perpustakaan Provinsi Lampung adalah sebesar 43% dari standar yang ditetapkan. Pemerataan Layanan Perpustakaan dapat diimplemetasikan dalam jumlah kelembagaan perpustakaan yang tersedia.

Pada Tahun 2024 jumlah Perpustakaan yang ada adalah sebanyak 5.335 perpustakaan, dimana kebutuhan perpustakaan berdasarkan jumlah penduduk adalah sebanyak 12.455 perpustakaan. Beberapa adalah

program kegiatan yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka Pemerataan Layanan Perpustakaan, yaitu:

Gambar 3.2.3  
Pembinaan Perpustakaan Desa



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2024 telah melaksanakan program kegiatan yang mendukung pemerataan tingkat layanan perpustakaan, diantaranya yaitu pembinaan kepada 12 Perpustakaan Desa di 12 Kabupaten/Kota selama tahun 2024.

2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melaksanakan Program kegiatan Perpustakaan, yaitu Mitra Program TPBIS (Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial) terdiri dari 18 Perpustakaan Desa meliputi Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung pada tahun 2024. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan telah melakukan kegiatan pemanfaatan layanan perpustakaan dengan buku dan sarana prasarana yang telah diberikan oleh Perpustakaan Nasional, pelibatan masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan promosi/sosialisasi dan advokasi ke berbagai lembaga/instansi terkait yang dapat membantu dalam pengembangan perpustakaan. Dalam 2 tahun terakhir Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan tertinggi dari Perpustakaan Nasional dalam pelaksanaan program TPBIS yaitu PIC terbaik, Perpustakaan Desa dengan inovasi layanan perpustakaan terbaik dan penulisan cerita dampak terbaik. Pada Tahun 2024 juga telah dilaksanakan Bimtek terkait TPBIS yang dihadiri oleh 35 peserta, berasal dari Taman Baca



Masyarakat (TBM), perpustakaan kelurahan yang berasal dari Kota Metro dan Kota Bandar Lampung.

Gambar 3.2.4  
Bimtek Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

3. Program Perpustakaan Keliling merupakan Program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka pemerataan pelayanan perpustakaan. Perpustakaan Keliling yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 berjumlah 3 (tiga) mobil yang membawa bahan bacaan ringan, dengan sasaran ke sekolah-sekolah, lembaga pemasyarakatan, kampus dan daerah-daerah tertinggal.

Gambar 3.2.5  
Perpustakaan Keliling Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  
Provinsi Lampung



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

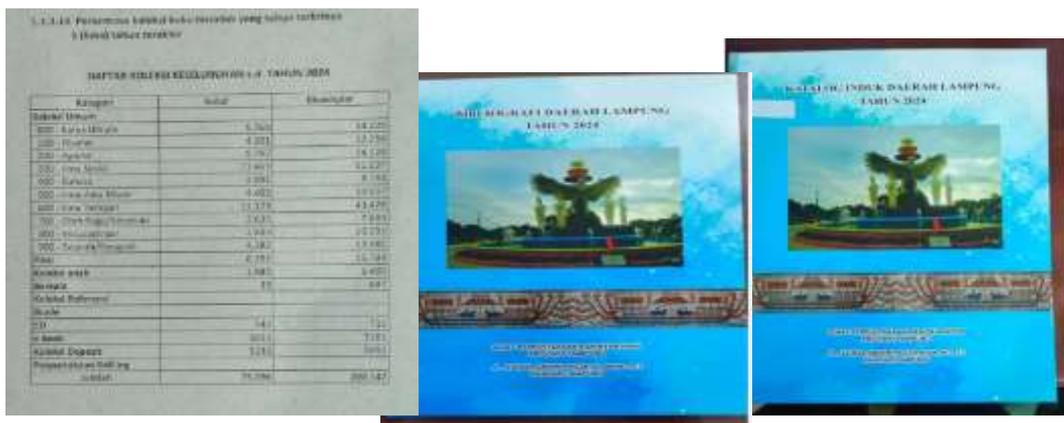


## B. Ketercukupan Koleksi (UPLM 2)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berusaha terus menyesuaikan jumlah koleksi perpustakaan dengan jumlah populasi penduduk. Secara ideal pemenuhan koleksi perpustakaan adalah 1 : 1, yaitu satu koleksi untuk satu penduduk. Pencapaian Kesesuaian koleksi perpustakaan pada tahun 2024 adalah sebesar 54% dari standar yang ditetapkan. Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan ketercukupan koleksi adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan telah melaksanakan kegiatan pengadaan bahan koleksi perpustakaan baik cetak maupun digital. Jumlah koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung hingga tahun 2024 telah mencapai 75.696 koleksi judul dengan total sebanyak 200.147 eksemplar.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 telah menerbitkan Katalog Induk Daerah (KID) yang merupakan daftar koleksi perpustakaan yang dimiliki oleh perpustakaan Provinsi Lampung yang berisi koleksi dari beberapa perpustakaan dengan jumlah 160 KID. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung juga menerbitkan Bibliografi Daerah Lampung (BID) yang merupakan daftar referensi yang berfungsi untuk menginventarisasi terbitan terbaru di suatu daerah (dalam hal ini dikhususkan untuk penerbit lokal/Lampung) sebanyak 150 BID.

Gambar 3.2.6  
Koleksi Perpustakaan Tahun 2024

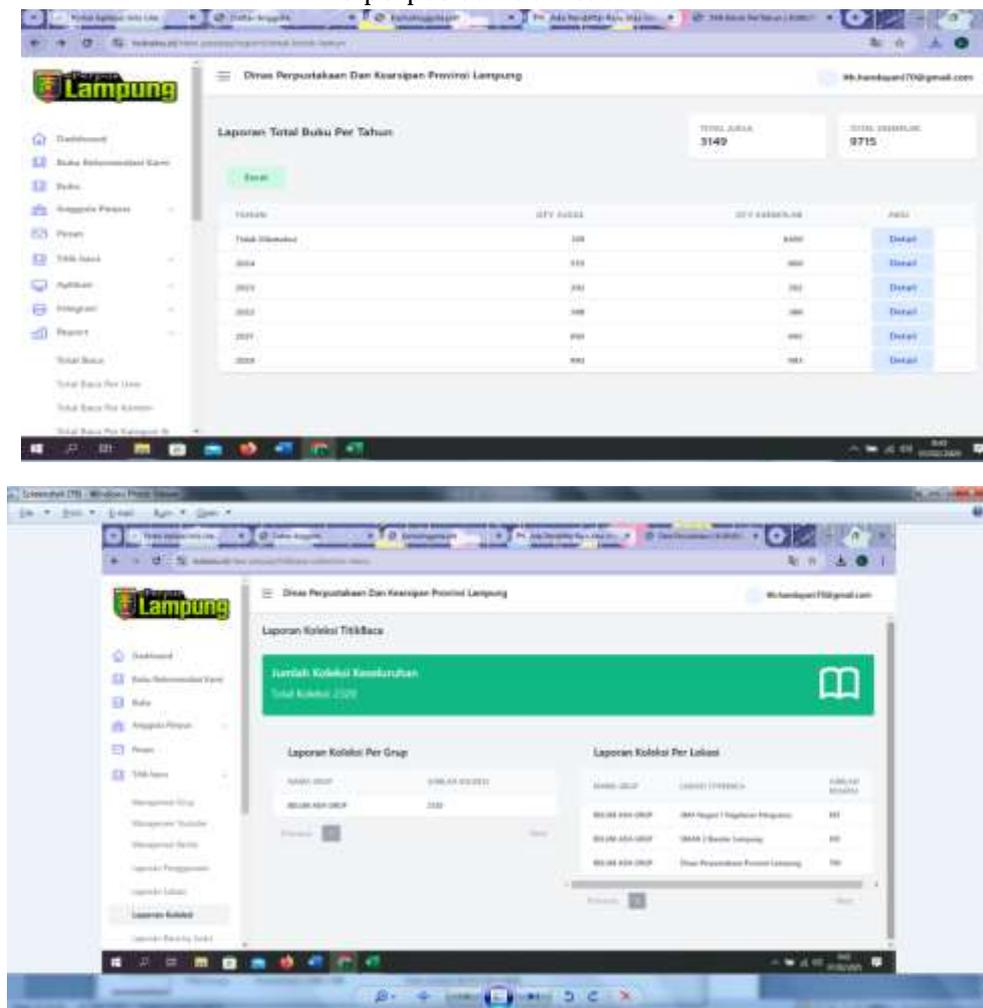


Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024



3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada Tahun 2024 telah melaksanakan pengadaan e-book, yang terdiri dari e-perpus dan titik baca. Total koleksi yang sudah dialih media kedalam bentuk e-book yang ada dalam aplikasi e-perpus adalah sebanyak 3149 judul koleksi, dan total koleksi titik baca adalah 2320 koleksi. Untuk program pengadaan Titik Baca ini berlokasi di 3 (tiga) tempat, yaitu SMAN 1 Pegelaran Pringsewu, SMAN 2 Bandar Lampung, dan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

Gambar 3.2.7  
e-perpus dan titik baca



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pebruari 2025



4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan alih media bagi 34 Naskah Kuno di Provinsi Lampung kedalam bentuk digital pada Tahun 2024. Hal ini bertujuan agar preservasi terhadap nilai sejarah dapat lebih terjaga.

### **C. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3)**

Ketercukupan Tenaga Perpustakaan masih harus ditingkatkan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam literasi. Pada tahun 2024 perbandingan jumlah tenaga perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Provinsi Lampung adalah 1 : 6080 sedangkan berdasarkan ketentuan adalah 1 : 2500. Pencapaian ketercukupan jumlah tenaga perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Provinsi Lampung adalah sebesar 41% dari standar ketentuan yang ada. Jumlah Tenaga Perpustakaan di Provinsi Lampung pada Tahun 2024 adalah 1532 orang.

### **D. Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan (UPLM 4)**

Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan merupakan kegiatan datang ke perpustakaan untuk melakukan kegiatan seperti proses pembelajaran sehingga tugas kuliah atau tugas sekolah dapat terselesaikan, pengetahuan bertambah, dan hasil akhirnya, prestasi belajar meningkat.

Tingkat Kunjungan ke Perpustakaan di Provinsi Lampung pada Tahun 2024 mencapai 16%, yaitu jumlah realisasi kunjungan pada Tahun 2024 adalah sebesar 29.211 kunjungan, sedangkan standar tingkat kunjungan masyarakat yang ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Lampung adalah sebesar 186.280 kunjungan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan masih terus berupaya meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 020/A1/VIII/1995 tentang usulan pencanangan hari kunjung perpustakaan, maka pada bulan

September Tahun 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan Program “*Hari Kunjung dan Bulan Gemar Membaca*”. Program Hari Kunjung dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, meningkatkan pemahaman pentingnya perpustakaan sebagai pusat peradaban dan sumber kecerdasan, serta meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Program ini terdiri atas beberapa lomba, seperti Lomba Mewarnai untuk siswa-siswi TK se-Provinsi Lampung, Lomba Menggambar untuk siswa-siswi Sekolah Dasar se-Provinsi Lampung, Lomba Pidato Bahasa Lampung untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama se-Provinsi Lampung, Lomba Roket Air untuk siswa-siswi SMP se-Bandar Lampung, Lomba Menulis Cerpen untuk siswa-siswi SMA/SMK/MA se-Provinsi Lampung.

Gambar 3.2.8  
Hari Kunjung dan Bulan Gemar Membaca  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024



2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sebagai Perpustakaan Rujukan juga melaksanakan kegiatan pengembangan layanan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kunjungan masyarakat, yaitu dengan membuka layanan kunjungan bagi pemustaka setiap hari Sabtu dengan jam kerja dibatasi hingga pukul 12.00 WIB.

#### **E. Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5)**

SNP merupakan kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan. Pembinaan Perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) telah mencapai 100% dari standar yang ada, yaitu sebesar 3.502 perpustakaan atau sebesar 65,64% dari standar yang seharusnya, yaitu sebesar 1.195 perpustakaan atau sebesar 22,39% dari jumlah perpustakaan. Program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dalam rangka meningkatkan jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP adalah sebagai berikut:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan Pembinaan Perpustakaan sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan). Salah satu program dalam rangka pembinaan lanjutan pada tingkat yang lebih tinggi yaitu program akreditasi perpustakaan. Pada Tahun 2024 jumlah perpustakaan yang sudah terakreditasi di Provinsi Lampung adalah sebanyak 151 perpustakaan, terdiri dari:
  - Perpustakaan SD sebanyak 35 perpustakaan
  - Perpustakaan SMP sebanyak 38 perpustakaan
  - Perpustakaan SMA sebanyak 32 perpustakaan
  - Perpustakaan desa sebanyak 8 perpustakaan
  - Perpustakaan Khusus sebanyak 7 perpustakaan
  - Perpustakaan Perguruan Tinggi sebanyak 16 perpustakaan
  - Perpustakaan Kab/Kota sebanyak 14 perpustakaan
  - Perpustakaan Provinsi sebanyak 1 perpustakaan.



#### F. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan (UPLM 6)

Keikutsertaan masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan sudah mencapai 100% dari standar yang ditetapkan, yaitu sebesar 3.920.922 orang atau sebesar 42,10% dari standar yang seharusnya, yaitu sebesar 186.280 orang atau sebesar 2% dari jumlah penduduk Provinsi Lampung. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai program seperti edukasi, pelatihan, dan sosialisasi.

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada bulan Mei Tahun 2024 telah melaksanakan Program ***Festival Literasi*** bertajuk "***Perpustakaan Bertransformasi, Literasi Maju, Lampung Berjaya***". Acara ini dihadiri Gubernur Lampung, Bapak Arinal Djunaidi, dimana sekaligus melaksanakan Peresmian Gedung Perpustakaan Provinsi Lampung. Hal ini bertepatan juga dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2024. Kegiatan ini melibatkan keikutsertaan masyarakat dari berbagai unsur. Kegiatan ini dilaksanakan dalam beberapa bentuk, antaranya:
  - a. Rakor Bunda Literasi, dilaksanakan bersamaan dengan pengukuhan Bunda Literasi Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
  - b. Talkshow Literasi, yang diikuti oleh komunitas pegiat literasi, pelajar, dan mahasiswa.
  - c. Pameran Berbasis Inklusi Sosial.
  - d. Lomba Bertutur dan Membaca Nyaring.
  - e. *Book Fair*, Donor Darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Gambar 3.2.9  
Festival Literasi dan Peresmian Gedung Perpustakaan  
Provinsi Lampung Tahun 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

### G. Anggota Perpustakaan (UPLM 7)

Anggota Perpustakaan adalah pengunjung perpustakaan yang sudah mendaftar dan memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota. Saat ini jumlah anggota perpustakaan telah mencapai 100% dari standar yang ditetapkan dan perlu dipertahankan serta ditingkatkan. Jumlah Anggota Perpustakaan di Provinsi Lampung mencapai realisasi 1.600.778 anggota atau sebesar 17,19% dari standar yang ditetapkan yaitu sebesar 186.280 anggota atau sebesar 2% dari jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2024.

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung terus meningkatkan jumlah keanggotaan Perpustakaan melalui Program "**Kartu Sakti**". Kartu Sakti perpustakaan yang dibuat ini telah terintegrasi secara nasional dengan perpustakaan nasional maupun perpustakaan yang menerapkan Kartu Sakti. Kartu ini dapat digunakan untuk mengakses layanan dan koleksi perpustakaan di

seluruh Indonesia. Pada Tahun 2024 jumlah anggota Kartu Sakti adalah sebanyak 2.944 anggota.

Gambar 3.2.10  
Kartu Sakti



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat angharus dihadapi, berikut adalah Tabel Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai Aksi pencapaian Sasaran Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat.

Table 3.2.6  
Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Aksi indikator IPLM

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang masih belum sesuai dengan perkembangan zaman</li><li>2. Belum seluruh pegiat literasi yang mendapatkan dukungan dalam rangka pencapaian pembudayaan literasi kepada masyarakat.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Semakin tingginya minat baca masyarakat di Provinsi Lampung;</li><li>b. Semakin banyaknya kelompok dan pegiat literasi yang ada di Provinsi Lampung</li><li>c. Fasilitas Gedung Baru sebagai sarana perpustakaan modern</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi</li><li>2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka pengelolaan bahan pustaka</li><li>3. Meningkatkan kerjasama dengan Stake</li></ol>	Program Unggulan: <ol style="list-style-type: none"><li>a. Program perpustakaan digital berbasis media sosial. Program ini mencakup berbagai aspek yang bermanfaat bagi penulis, penerbit, dan pembaca, beberapa tujuan utama program ini yaitu Mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses</li></ol>



Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
		<p>Holder Perpustakaan</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Mengoptimalkan pelayanan perpustakaan dan pelayanan</li><li>5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk mengoptimalkan TI dalam pengelolaan perpustakaan</li><li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan</li></ol>	<p>produksi dan distribusi buku cetak, Aksesibilitas yang lebih baik, efisiensi biaya, Preservasi dan Fleksibilitas Pelestarian Konten, dan Interaktivitas</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Pojok Baca Digital merevolusi cara orang mengakses dan menikmati bacaan dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan lebih luas ke berbagai sumber informasi, sering kali dengan biaya yang lebih rendah dan dengan kemudahan akses yang lebih tinggi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah memberikan bantuan pojok baca digital kepada 12 (duabelas) Perpustakaan Desa/Sekolah/Pondok Pesantren di 7 Kabupaten/Kota, serta ke 3 lembaga pelayanan publik yaitu PT. KAI, Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek dan PT. Angkasa Pura II. Prinsip dasar perluasan program ini yaitu dengan memperluas layanan perpustakaan agar dapat dinikmati di pusat-pusat kegiatan masyarakat, menyiapkan Konten/ Koleksi yang tersedia dirancang Inklusif menurut Strata Sosial Penggunaannya, dan Berbasis Teknologi Digital.</li><li>3. Program inovasi Titik Baca merupakan platform yang hadir sebagai Pusat Informasi dan Literasi yang dihadirkan di tengah masyarakat. Isi yang terkandung didalamnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Tugu Baca dapat diakses dengan memindai <i>qr code</i> yang telah disediakan pada tempat-tempat tertentu dimana masyarakat berkumpul antara lain, Bandara, Halte Bus, Balai Desa, dan tempat pelayanan publik lainnya.</li></ol>



Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
			Kegiatan: 1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 3. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi 4. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah

Berdasarkan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ada, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memberikan rekomendasi/implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- Melakukan kerjasama dengan Dinas PMD terkait kewajiban pemerintah desa/kelurahan menganggarkan pembangunan perpustakaan desa melalui dana desa berdasarkan Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019.
- Mengajukan perda yang mewajibkan setiap OPD maupun unit kerja di lingkungan Pemprov Lampung untuk memiliki Perpustakaan Khusus
- Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan Kementerian Agama Provinsi Lampung terkait surat edaran bersama untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Salah satunya agar sekolah melakukan input data dalam NPP (Nomor Pokok Perpustakaan)
- Melakukan pengadaan koleksi buku cetak maupun digital
- Sosialisasi undang-undang karya cetak dan karya rekam Nomor 13 Tahun 2018. dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran penerbit dan produsen karya cetak dan karya rekam untuk menyerahkan karya mereka.



- Bekerjasama dengan perguruan tinggi di Provinsi Lampung terkait program bebas pustaka
- Sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan Sekolah. Jumlah Koleksi sesuai SNP adalah berjumlah minimal 1000 judul dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan terkait bahwa buku paket adalah bukan koleksi perpustakaan
- Bekerjasama dengan perusahaan BUMN atau BUMD terkait CSR pengadaan buku perpustakaan
- Sosialisasi Standar Nasional Perpustakaan Sekolah. Jumlah tenaga perpustakaan sesuai SNP adalah berjumlah minimal 3 orang dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan
- Mengusulkan formasi Fungsional pustakawan kepada BKN/BKD untuk kebutuhan pegawai di perpustakaan di instansi daerah masing masing
- Melakukan kerjasama dengan perpustakaan sekolah se Bandar Lampung untuk mengadakan pembelajaran di perpustakaan daerah minimal 1 kali dalam setahun.
- Mengadakan event-event literasi di perpustakaan daerah provinsi lampung dengan daaftar hadir menggunakan aplikasi pengunjung INLISlite
- Mou dengan peminjam gedung perpustakaan agar setiap orang yang hadir untuk dapat mengisi daftar pengunjung perpustakaan
- Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dengan Perguruan Tinggi terkait pemanfaatan perpustakaan daerah dan akses e-perpus Lampung
- Melaksanakan pembinaan perpustakaan sekolah atau desa sesuai SNP untuk segera melakukan akreditasi perpustakaan
- Mengembangkan program kegiatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan ekonomi baik secara online maupun online
- Melakukan monitoring dan evaluasi data dan kegiatan yang di input dalam sistem informasi manajemen TPBIS secara realtime



- Melaksanakan sosialisasi melalui media sosial dan cetak kepada masyarakat untuk mendaftar kartu SAKTI, dan menghimbau perpustakaan Kab/Kota untuk menggunakan aplikasi INLISlite dan mengintegrasikan kedalam kartu SAKTI

Program Unggulan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:

1. **Program e-Perpus** merupakan perpustakaan digital berbasis media sosial. Program ini mencakup berbagai aspek yang bermanfaat bagi penulis, penerbit, dan pembaca, beberapa tujuan utama program ini yaitu Mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses produksi dan distribusi buku cetak, Aksesibilitas yang lebih baik, efisiensi biaya, Preservasi dan Fleksibilitas Pelestarian Konten, dan Interaktivitas
2. **Pojok Baca Digital** merevolusi cara orang mengakses dan menikmati bacaan dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan lebih luas ke berbagai sumber informasi, sering kali dengan biaya yang lebih rendah dan dengan kemudahan akses yang lebih tinggi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah memberikan bantuan pojok baca digital kepada 12 (duabelas) Perpustakaan Desa/ Sekolah/Pondok Pesantren di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, serta kepada 3 (tiga) lembaga pelayanan publik yaitu PT.KAI, Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek dan PT. Angkasa Pura II. Prinsip dasar perluasan program ini yaitu dengan Memperluas layanan perpustakaan agar dapat dinikmati di pusat-pusat kegiatan masyarakat, menyiapkan Konten/Koleksi yang tersedia dirancang Inklusif menurut Strata Sosial Penggunaanya, dan Berbasis Teknologi Digital.
3. **Program Inovasi Titik Baca** merupakan platform yang hadir sebagai Pusat Informasi dan Literasi yang dihadirkan di tengah masyarakat. Isi yang terkandung didalamnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Titik Baca dapat diakses dengan memindai *qr code* yang telah disediakan pada tempat tempat tertentu



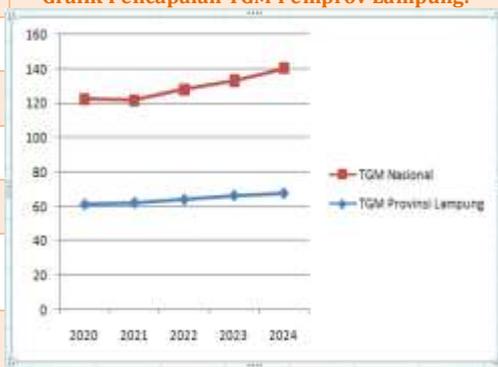
dimanamasyarakat berkumpul antara lain, Bandara, Halte Bus, Balai Desa, dan tempat pelayanan publik lainnya.

## 2. Nilai Tingkat Gemar Membaca

Tingkat Kegemaran Membaca adalah tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dilakukan secara mandiri dalam jangka waktu tertentu. Tingkat gemar membaca merupakan indikator utama dari keterlibatan masyarakat dalam aktivitas literasi. Hal ini mencakup tidak hanya frekuensi dan durasi membaca, tetapi juga kualitas keterlibatan dengan bahan bacaan. Analisis pengukuran capaian **Nilai Tingkat Gemar Membaca** Provinsi Lampung tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.7  
Pencapaian Sasaran Kinerja dengan Indikator TGM

Sasaran 1					
Sasaran 1	Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat				
IKU	Nilai Tingkat Gemar Membaca				
Satuan	Angka				
Capaian Nilai Tingkat Gemar Membaca Provinsi Lampung Tahun 2019-2024					
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Nasional
1	2019	n/a	n/a	n/a	n/a
2	2020	53,63	61,48	114,64%	61,09
3	2021	55,74	62,44	112,02%	59,52
4	2022	59,52	64,19	107,85%	63,90
5	2023	63,90	66,38	103,88%	66,77
6	2024	66,77	67,67	101,35%	72,44



Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Sasaran Meningkatkan Budaya Gemar Membaca di Masyarakat memiliki indikator yaitu Nilai Tingkat Gemar Membaca dengan capaian sebesar **67,67** dari target sebesar **66,77** yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024.** Berdasarkan target tersebut persentase capaian kinerjanya adalah **101,35%**. Nilai Tingkat Gemar Membaca masyarakat



terlihat dinamis setiap tahunnya dengan capaian kinerja sebagai berikut: pada tahun 2020 mencapai **114,64%**, **2021** mencapai **112,02%**, **2022** mencapai **107,85%**, **2023** mencapai **103,88%** dan **2024** mencapai **101,35%** dengan kategori **Sedang** dalam skala Nasional.

Tabel 3.2.8  
Capaian Sasaran Kinerja dengan Indikator TGM (2024 – Nasional)

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya Budaya Gemar Membacadi Masyarakat	
IKU	Nilai Tingkat Gemar Membaca	
Satuan	Angka	
2024		Nasional
Target	Capaian	72,44
66,77	101,35	

Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja akhir Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2024 yaitu 67,67, maka realisasi Indeks Tingkat Gemar Membaca Provinsi Lampung lebih rendah 4,77 poin dari realisasi Nasional. Berikut Tabel Nilai Tingkat Gemar Membaca Nasional Tahun 2024.

Tabel 3.2.9  
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Nasional Tahun 2024

No.	Aktivitas Membaca	Nilai	Kategori
1	Frekuensi Membaca	77,76	5-6 kali perminggu
2	Durasi Membaca	65,36	1 jam-1 jam 59 menit per hari
3	Jumlah Bahan Bacaan	73,71	3-4 bahan bacaan pertiga bulan
4	Frekuensi Akses Internet	79,47	5-6 kali perminggu
5	Durasi Akses Internet	68,41	1 jam-1 jam 59 menit per hari
<b>TGM Nasional</b>		<b>72,44</b>	<b>Sedang</b>

Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Berdasarkan Tabel diatas, Nilai Tingkat Gemar Membaca masyarakat Indonesia pada tahun 2024 sebesar **72,44** atau berada dalam kategori **sedang**. Mayoritas provinsi di Indonesia memiliki Nilai Tingkat Gemar Membaca dalam kategori sedang yaitu sebanyak 33 provinsi atau setara



dengan 86,84% provinsi. Selain itu, terdapat empat provinsi memiliki rata-rata Nilai Tingkat Gemar Membaca yang berada dalam kategori tinggi dan hanya satu provinsi memiliki rata-rata Nilai Tingkat Gemar Membaca yang berada dalam kategori rendah.

Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dengan nilai IPLM pada Perpustakaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.10  
Nilai Tingkat Gemar Membaca Provinsi Lampung Tahun 2024  
berdasarkan rata-rata Tingkat Gemar Membaca seluruh Kab/Kota di Provinsi Lampung

PROVINSI/KAB/KOTA	Nilai TGM	Kategori
<b>PROVINSI LAMPUNG</b>	<b>67,67</b>	<b>Sedang</b>
Kab.Lampung Barat	69,90	Sedang
Kab.Lampung Selatan	70,07	Sedang
Kab.Lampung Tengah	72,76	Sedang
Kab.Lampung Timur	58,74	Sedang
Kab.Lampung Utara	65,35	Sedang
Kab.Mesuji	62,67	Sedang
Kab.Pesawaran	66,52	Sedang
Kab.Pesisir Barat	65,63	Sedang
Kab.Pringsewu	61,62	Sedang
Kab.Tanggamus	61,64	Sedang
Kab.Tulang Bawang	59,78	Sedang
Kab.Tulang Bawang Barat	72,36	Sedang
Kab.Way Kanan	65,38	Sedang
KotaBandar Lampung	78,71	Tinggi
Kota Metro	78,43	Tinggi

Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Berdasarkan Tabel diatas, Nilai Tingkat Gemar Membaca Provinsi Lampung sebesar 67,67 dan masuk dalam sedang. Tiga kabupaten/kota dengan Nilai Tingkat Gemar Membaca tertinggi yaitu Kota Bandar Lampung 78,71; Kota Metro 78,43; dan Kab. Lampung Tengah 72,76. Sedangkan tiga kabupaten/kota dengan Nilai Tingkat Gemar Membaca terendah yaitu Kab. Lampung Timur 58,74; Kab. Tulang Bawang 59,78; dan Kab. Pringsewu 61,62

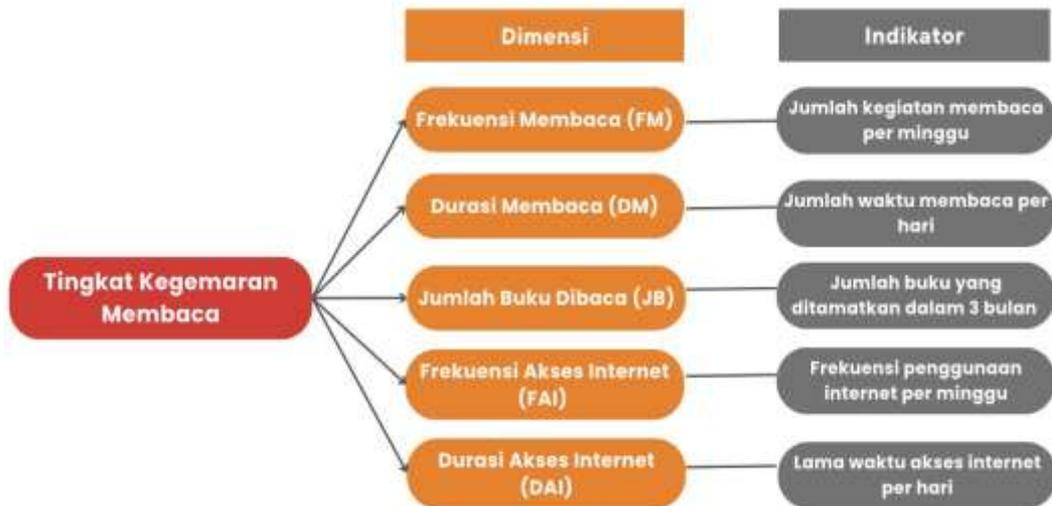
Gambar 3.2.11



Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca diukur dengan beberapa dimensi, antara lain frekuensi membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet dan durasi akses internet. Berikut Gambar Indikator dari Dimensi Nilai Tingkat Gemar Membaca:

Gambar 3.2.12  
Indikator Nilai Tingkat Gema Membaca Tahun 2024



Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*

Berikut adalah Tabel Nilai Tingkat Gema Membaca di Provinsi Lampung beserta penjelasannya.

Tabel 3.2.11  
Nilai Tingkat Gema Membaca di Provinsi Lampung Tahun 2024

No.	Aktivitas Membaca	Nilai	Keterangan
1.	Frekuensi Membaca	73,57	Rata-rata frekuensi membaca 5-6 kali/minggu
2.	Durasi Membaca	59,87	Rata-rata durasi membaca 1 jam 59 menit/hari
3.	Jumlah Bahan Bacaan	68,90	Rata-rata jumlah bacaan yang dibaca 5-6 bacaan/3 bulan
4.	Frekuensi Akses Internet	75,42	Rata-rata frekuensi akses internet untuk membaca/mencari informasi 5-6 kali/minggu
5.	Durasi Akses Internet	64,00	Rata-rata durasi akses internet untuk membaca/mencari informasi 1 jam 59 menit/hari
<b>Jumlah</b>		<b>67,67</b>	<b>Interpretasi : Sedang</b>

Sumber: *Perpusnas RI, Desember 2024*



Nilai Tingkat Gemar Membaca diperoleh dari 30% frekuensi membaca, 30% durasi membaca, 30% jumlah bahan bacaan, 5% frekuensi akses internet, dan 5% durasi akses internet. Kelima dimensi Tingkat Gemar Membaca diukur menggunakan skala *likert* untuk mengukur data kuantitatif tentang sikap atau perilaku aktivitas membaca masyarakat.

Berdasarkan Tabel diatas, terlihat nilai dari masing-masing dimensi Nilai Tingkat Gemar Membaca di Provinsi Lampung, yang meliputi:

1. **Rata-rata Frekuensi Membaca** masyarakat Provinsi Lampung sebesar 73,57 dengan kategori **tinggi** atau setara 5-6 kali per minggu.
2. **Rata-rata Durasi Membaca** masyarakat Provinsi Lampung sebesar 59,87 dengan kategori **sedang** atau setara 1 jam-1 jam 59 menit perhari.
3. **Rata-rata Jumlah Bahan Bacaan** yang dibaca oleh masyarakat Provinsi Lampung sebesar 68,90 dengan kategori **sedang** atau setara 3-4 bahan bacaan per tiga bulan.
4. **Rata-rata Frekuensi Akses Internet** masyarakat Provinsi Lampung untuk membaca atau mencari informasi sebesar 75,42 dengan kategori **tinggi** atau setara 5-6 kali per minggu.
5. **Rata-rata Durasi Aktivitas Internet** masyarakat Provinsi Lampung untuk membaca atau mencari informasi sebesar 64,00 yang berada dalam kategori **sedang** atau setara 1 jam-1 jam 59 menit per hari.

Topik bahan bacaan yang paling diminati oleh masyarakat adalah kesenian, hiburan, dan olahraga serta jenis bahan bacaan favorit yang menjadi referensi masyarakat adalah kumpulan karangan/bunga rampai (kumpulan esai, puisi, artikel, majalah, dan lain-lain). Masyarakat Provinsi Lampung saat ini menyukai format bahan bacaan secara terurut, yaitu bahan digital, bahan audio visual, dan bahan cetak.

Hubungan antara Nilai Tingkat Gemar Membaca dengan semakin banyak jumlah koleksi yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung serta intensitas mengunjungi perpustakaan menunjukkan hubungan positif signifikan



Dalam Rangka meningkatkan Budaya Gemar Membaca di Provinsi Lampung, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan beberapa program kegiatan selama periode Tahun 2024, yaitu diantaranya:

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah menerapkan program kunjungan masyarakat ke Perpustakaan selama 6 (enam) hari kerja melalui sistem piket tenaga perpustakaan dalam rangka memenuhi intensitas kunjungan masyarakat ke Perpustakaan.
2. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka pemerataan pelayanan perpustakaan telah melaksanakan Program Perpustakaan Keliling ke ruang-ruan publik untuk mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh bahan bacaan ringan.
3. Dalam rangka memenuhi jumlah bahan bacaan yang dibutuhkan masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung di Tahun 2024 telah menambah koleksi bahan pustaka pada kegiatan pengadaan bahan koleksi perpustakaan baik cetak maupun digital. Jumlah koleksi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung hingga tahun 2024 telah mencapai 75.696 koleksi judul dengan total sebanyak 200.147 eksemplar.
4. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung di Tahun 2024 telah melaksanakan pengadaan *e-book*, yang terdiri dari *e-perpus* dan titik baca. Total koleksi yang sudah dialih media kedalam bentuk *e-book* yang ada dalam aplikasi *e-perpus* adalah sebanyak 3149 judul koleksi, dan total koleksi titik baca adalah 2320 koleksi. Hal ini dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi dimensi pendukung Nilai Tingkat Gemar Membaca yaitu frekuensi dan durasi masyarakat dalam mengakses internet.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan



sub kegiatan, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat angharus dihadapi, berikut adalah Tabel Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai Aksi pencapaian Sasaran Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat.

Table 3.2.12  
Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Aksi indikator TGM

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana layanan perpustakaan yang masih belum sesuai dengan perkembangan zaman</li> <li>3. Belum seluruh pegiat literasi yang mendapatkan dukungan dalam rangka pencapaian pembudayaan literasi kepada masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin tingginya minat baca masyarakat di Provinsi Lampung;</li> <li>2. Semakin banyaknya kelompok dan pegiat literasi yang ada di Provinsi Lampung</li> <li>3. Fasilitas Gedung Baru sebagai sarana perpustakaan modern</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi</li> <li>2. Meningkatkan kemampuan SDM dalam rangka pengelolaan bahan pustaka</li> <li>3. Meningkatkan kerjasama dengan Stake Holder Perpustakaan</li> <li>4. Mengoptimalkan pelayanan perpustakaan dan pelayanan</li> <li>5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya aparatur untuk mengoptimalkan TI dalam pengelolaan perpustakaan</li> <li>6. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perpustakaan</li> </ol>	<p>Program Unggulan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program perpustakaan digital berbasis media sosial. Program ini mencakup berbagai aspek yang bermanfaat bagi penulis, penerbit, dan pembaca, beberapa tujuan utama program ini yaitu Mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses produksi dan distribusi buku cetak, Aksesibilitas yang lebih baik, efisiensibiaya, Preservasi dan Fleksibilitas Pelestarian Konten,dan Interaktivitas</li> <li>2. Pojok Baca Digital merevolusi cara orang mengakses dan menikmati bacaan dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan lebih luas ke berbagai sumber informasi, sering kali dengan biaya yang lebih rendah dan dengan kemudahan akses yang lebih tinggi. Dinas Perpustakaan danKearsipanProvinsiLampung telah memberikan bantuan pojok baca digital kepada 12 (duabelas)PerpustakaanDesa/Sekolah/PondokPesantren di7Kabupaten/Kota,sertakepada31 embagapelayanan publikyaituPT.KAI,RumahSakitUmumAbdoelMoeloek dan PT. Angkasa Pura II. Prinsip dasar perluasan program ini yaitu dengan Memperluas layanan perpustakaan agar dapat dinikmati di pusat-pusat kegiatan masyarakat, menyiapkan Konten/ Koleksi yang tersedia dirancang Inklusif menurut Strata Sosial Penggunanya, dan Berbasis Teknologi Digital.</li> <li>3. Program inovasi Titik Baca merupakan platform yang hadir</li> </ol>



Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
			<p>sebagai Pusat Informasi dan Literasi yang dihadirkan di tengah masyarakat. Isi yang terkandung didalamnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Tugu Baca dapat diakses dengan memindai <i>qr code</i> yang telah disediakan pada tempat tempat tertentu dimanamasyarakat berkumpul antara lain, Bandara, Halte Bus,Balai Desa, dan tempat pelayanan publik lainnya.</p> <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</li><li>2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</li><li>3. Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</li><li>4. Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah</li></ol>

Berdasarkan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ada, maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memberikan rekomendasi/implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan Nilai Tingkat Gemar Membaca di Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Lampung Perlu segera merealisasikan komitmen Kepala Daerah untuk mempercepat program peningkatan perpustakaan menjadi Perpustakaan moderen dengan memberikan support berupa pengadaan buku buku konvensional atau buku digital sesuai standar perpustakaan Nasional serta pemenuhan meubeler berupa meja, kursi rak buku sebagai penunjang layanan perpustakaan untuk meningkatkan layanan literasi bagi masyarakat;
- Mendorong peningkatan anggaran belanja proporsional untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung nilai Tingkat Gemar Membaca Provinsi Lampung yang masih dibawah skala Nasional;
- Mendorong inovasi dan kreatifitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait program literasi digital bagi masyarakat hingga ke pelosok desa,



mengingat program dari OPD terkait terkesan masih *copy-paste* dari Program Pemerintah Pusat dan kurang bermuatan kearifan lokal.

Program Unggulan dalam rangka meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat:

4. **Program e-Perpus** merupakan perpustakaan digital berbasis media sosial. Program ini mencakup berbagai aspek yang bermanfaat bagi penulis, penerbit, dan pembaca, beberapa tujuan utama program ini yaitu Mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari proses produksi dan distribusi buku cetak, Aksesibilitas yang lebih baik, efisiensi biaya, Preservasi dan Fleksibilitas Pelestarian Konten, dan Interaktivitas
5. **Pojok Baca Digital** merevolusi cara orang mengakses dan menikmati bacaan dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan lebih luas ke berbagai sumber informasi, sering kali dengan biaya yang lebih rendah dan dengan kemudahan akses yang lebih tinggi. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah memberikan bantuan pojok baca digital kepada 12 (duabelas) Perpustakaan Desa/ Sekolah/Pondok Pesantren di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota, serta kepada 3 (tiga) lembaga pelayanan publik yaitu PT.KAI, Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek dan PT. Angkasa Pura II. Prinsip dasar perluasan program ini yaitu dengan Memperluas layanan perpustakaan agar dapat dinikmati di pusat-pusat kegiatan masyarakat, menyiapkan Konten/Koleksi yang tersedia dirancang Inklusif menurut Strata Sosial Penggunaanya, dan Berbasis Teknologi Digital.
6. **Program Inovasi Titik Baca** merupakan platform yang hadir sebagai Pusat Informasi dan Literasi yang dihadirkan di tengah masyarakat. Isi yang terkandung didalamnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar. Titik Baca dapat diakses dengan memindai *qr code* yang telah disediakan pada tempat tempat tertentu dimanamasyarakat berkumpul antara lain, Bandara, Halte Bus, Balai Desa, dan tempat pelayanan publik lainnya.



Analisis pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung tahun 2024 berdasarkan Sasaran ke-2 (kedua) **“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital”** memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut:

### 1. Nilai Digitalisasi Arsip (TDGA)

Nilai Digitalisasi Arsip menurut Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor 392 Tahun 2023 adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauhmana pengelolaan arsip di instansi pemerintah telah beralih dari sistem manual ke sistem digital.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan pengelolaan arsip secara elektronik melalui pengelolaan arsip digital.

Analisis pengukuran capaian Indikator Indeks Digitalisasi Arsip adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.13  
Pencapaian Sasaran Kinerja dengan Indikator Nilai Digitalisasi Arsip

Sasaran 2					
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital				
IKU1	Nilai Digitalisasi Arsip				
Satuan	Angka				
Capaian Indeks Digitalisasi Arsip Provinsi Lampung Tahun 2019-2024					
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Nasional
1	2019	n/a	n/a	n/a	n/a
2	2020	n/a	n/a	n/a	n/a
3	2021	n/a	n/a	n/a	n/a
4	2022	n/a	n/a	n/a	n/a
5	2023	85,51	89,27	104,40	66,12
6	2024	88,00	87,63	99,58	74,80

**Grafik Pencapaian Digitalisasi Arsip Pemprov Lampung:**

Tahun	Digitalisasi Arsip Nasional	Digitalisasi Arsip Lampung
2023	66,12	104,40
2024	74,80	99,58

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024



Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital memiliki indikator yaitu **Nilai Digitalisasi Arsip** dengan realisasi sebesar 87,63 dari target sebesar 88,00 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024**. Berdasarkan target tersebut persentase capaian kinerjanya adalah 99,58%. **Nilai Digitalisasi Arsip** menurun dari tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja sebagai berikut: pada tahun 2023 mencapai **104,40%**, dan tahun 2024 mencapai **99,58%** dengan kategori “**Memuaskan**” dalam skala Nasional. Namun secara kinerja Nilai Digitalisasi menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023.

Tabel 3.2.14

Capaian Sasaran Kinerja dengan Indikator Nilai Digitalisasi Arsip (2024 – Nasional)

Sasaran 2		
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	
IKU1	Nilai Digitalisasi Arsip	
Satuan	Angka	
2024		Nasional
Target	Capaian	74,80
88,00	99,58	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung maka capaian kinerja Nilai Digitalisasi Arsip mencapai **99,58%**, dan realisasi nasional pada tahun 2024 yaitu 74,80. Dengan demikian, realisasi Nilai Digitalisasi Arsip Provinsi Lampung lebih tinggi **12,83 poin** dari realisasi Nasional.

Dalam pengukuran Nilai Digitalisasi Arsip terdiri atas beberapa variabel nilai, yaitu Aksesibilitas, Keamanan, Efisiensi, Efisiensi, dan Ekonomi. Berikut adalah Tabel Indikator Nilai Digitalisasi Arsip.



Tabel 3.2.15  
Indikator Nilai Digitalisasi Arsip  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024

No	Indikator Nilai Digitalisasi Arsip	Jumlah Realisasi Tahun 2024	Jumlah Standar Ketentuan	Nilai Capaian Aspek
1	Nilai Aksesibilitas	72 Arsip	75 Arsip	96,00
2	Nilai Keamanan	3748 Arsip	3759 Arsip	99,71
3	Nilai Efisiensi	3 menit	30 menit	90,00
4	Nilai Kualitas	31 Arsip	47 Arsip	65,96
5	Nilai Ekonomi	47.300 rupiah	350.000 rupiah	86,49
	<b>Nilai Digitalisasi Arsip</b>			<b>87,63</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai Digitalisasi Arsip didukung oleh nilai yang ada pada tiap indikator, yaitu:

- 1. Aksesibilitas** merupakan ukuran keterjangkauan, meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha. Nilai Aksesibilitas Arsip adalah Jumlah pengguna yang dapat mengakses arsip digital dari Jumlah total pengguna.
- 2. Keamanan** merupakan tolok ukur penting mengenai seberapa rentan sesuatu terhadap ancaman. Nilai Keamanan Arsip adalah Jumlah arsip yang dilindungi dari kerusakan atau kehilangan dari Jumlah total arsip.
- 3. Efisiensi** adalah kemampuan yang diukur untuk menghindari kesalahan atau pemborosan tenaga, waktu, bahan, upaya, atau uang saat menjalankan tugas. Nilai Efisiensi Arsip adalah Waktu yang dihemat dengan menggunakan arsip digital dibandingkan Waktu yang dibutuhkan untuk mengakses arsip manual.
- 4. Kualitas** adalah nilai yang diperoleh dari persepsi pelanggan terhadap kualitas dan kinerja yang diharapkan. Nilai Kualitas Arsip adalah Jumlah arsip yang memiliki kualitas yang baik dari Jumlah total arsip.
- 5. Ekonomi** merupakan estimasi nilai atas pemanfaatan sumber daya, baik langsung maupun tidak langsung. Nilai Ekonomi Arsip adalah Biaya yang



dihemat dengan menggunakan arsip digital dibandingkan Biaya yang dibutuhkan untuk mengelola arsip manual.

Berdasarkan Tabel Indikator Nilai Digitalisasi Arsip diatas, dapat dilihat bahwa Nilai Keamanan memiliki nilai capaian yang tertinggi sebesar 99,71%, Hal ini menunjukkan bahwa dengan digitalisasi maka Arsip lebih minim risiko kehilangan dan kerusakan fisik. Selain itu nilai capaian tiap Indikator Nilai Digitalisasi Arsip lainnya telah mencapai nilai dengan kategori tinggi.

Tabel 3.2.16  
Nilai Digitalisasi Arsip Kabupaten Kota se Provinsi Lampung

NO.	PEMERINTAH DAERAH	PREDIKAT	INDEKS	PREDIKAT	INDEKS
		2023		2024	
1	PROVINSI LAMPUNG	A	89,27	A	87,63
2	KOTA BANDAR LAMPUNG	D	28,09	CC	56,42
3	KOTA METRO	BB	72,96	A	82,34
4	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	D	11,43	D	34,45
5	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	D	14,14	B	65,62
6	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	D	15,57	CC	51,32
7	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	CC	55,74	B	60,91
8	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	D	13,00	C	46,66
9	KABUPATEN MESUJI	D	14,07	B	60,70
10	KABUPATEN PESAWARAN	C	46,05	C	44,95
11	KABUPATEN PESISIR BARAT	D	8,14	D	21,60
12	KABUPATEN PRINGSEWU	B	65,36	BB	73,25
13	KABUPATEN TANGGAMUS	D	15,43	D	19,88
14	KABUPATEN TULANG BAWANG	D	11,71	CC	58,49
15	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	D	9,14	C	45,97
16	KABUPATEN WAY KANAN	D	7,71	CC	54,48

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa Nilai Digitalisasi Arsip Pemerintah Daerah yang sudah berpredikat memuaskan baru diduduki Provinsi Lampung dan Kota Metro, untuk Kabupaten yang berpredikat Sangat Baik yaitu Kabupaten Pringsewu, dan dua Kabupaten lainnya berpredikat Baik, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Mesuji. Sedangkan sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung masih memperoleh nilai dibawah kategori Baik.



Pengelolaan Arsip elektronik diperoleh dari nilai Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE), meliputi:

1. Digitasi Arsip, terdiri atas Pelaksanaan Alih Media Arsip.
2. Implementasi Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (ABKD)
  - Penggunaan aplikasi SIRIKANDI versi live
  - Pembuatan naskah dinas elektronik
  - Penandatanganan elektronik sesuai sertifikat elektronik BSSN
  - Pengendalian naskah dinas elektronik
  - Pemberkasan arsip elektronik
3. Sumber Daya ABKD
  - Pelaksanaan evaluasi ABKD melalui audit TIK
  - ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan arsip elektronik
  - Ketersediaan data center yang memenuhi syarat Tier 3
  - Ketersediaan Tim Help Desk
4. Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
  - Terdaftar sebagai Simpul Jaringan
  - Implementasi tanggung jawab Simpul Jaringan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, berikut adalah Tabel Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai Aksi pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital.



Table 3.2. 17  
Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Aksi indikator Nilai Digitalisasi Arsip

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
<ol style="list-style-type: none"><li>Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah terhadap pengelolaan arsip,</li><li>Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih kurang</li><li>Di bidang Kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja karena belum adanya tenaga fungsional arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan</li><li>Belum semua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung sadar dan menyerahkan serta menitipkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan</li><li>Penyelamatan arsip bernilai sejarah kurang intensif</li><li>Perlindungan dan pengamanan terhadap arsip vital belum efektif</li><li>Terkendalanya sosialisasi dan pembinaan kearsipan pada Instansi Pemerintah dan Swasta, yang disebabkan terbatasnya anggaran</li></ol>	<p>Adanya Regulasi tentang Kearsipan</p> <p>Pelaksanaan penataan kearsipan berdasarkan kodefikasi dan klasifikasi</p> <p>Semakin meningkatnya OPD yang sadar arsip</p> <p>Komitmen stakeholder untuk pengelolaan arsip berbasis TIK</p>	<p>-Melakukan sosialisasi dan pembinaan kearsipan bagi aparatur pemerintah</p> <p>-Melaksanakan Pengawasan terutama dalam implementasi Arsip Digital.</p>	<p>Program Unggulan:</p> <p><b>1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung upaya penerapan aplikasi Srikandi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.</b></p> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</li><li>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</li><li>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</li></ol>

Berdasarkan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ada , maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memberikan rekomendasi/implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan Nilai Digitalisasi Arsip adalah sebagai berikut:



- Melaksanakan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan arsip vital keseluruhan perangkat daerah hingga menghasilkan daftar arsip.
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan keseluruhan perangkat daerah dengan target pengawasan internal mendapatkan kategori B (Baik).
- Mendorong peningkatan penggunaan Aplikasi SRIKANDI keseluruhan perangkat daerah dalam transaksi internal dan eksternal kearsipan.
- Meningkatkan Jumlah dan Kompetensi Arsiparis melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan, sertifikasi dalam jabatan dan atau teknis tertentu yang diselenggarakan ANRI.
- Mendorong peningkatan anggaran belanja proporsional untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung Nilai Digitalisasi Arsip Provinsi Lampung agar tetap dapat mempertahankan posisi kategori memuaskan dalam skala Nasional.

Program Unggulan dalam rangka meningkatkan Indeks Digitalisasi Arsip Tahun 2024 antara lain :

1. Implementasi Aplikasi **SRIKANDI** (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Pada tahun 2024 terdapat catatan terkait SRIKANDI, dikarenakan belum semua perangkat daerah menggunakannya (mulai dari pembuatan dan penerimaan, hingga pemberkasan). Evaluasi Aplikasi SRIKANDI meliputi Pengelolaan Arsip Dinamis sampai pada tahap pemberkasan. Pada Tahun 2024, dari jumlah OPD Provinsi Lampung baru terdapat 2 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan hingga tahap pemberkasan, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Sampai dengan saat ini jumlah arsip yang telah diciptakan di Provinsi Lampung pada Aplikasi SRIKANDI sebanyak 36.347.810 Naskah Masuk dan 33,269,917 Naskah Keluar. Hal ini dapat dibuktikan dengan Gambar Data melalui Aplikasi SRIKANDI sebagai berikut :



Gambar3.2.13  
Data Naskah di Aplikasi SRIKANDI PemerintahProvinsi Lampung



Sumber Data : Srikandi.anri.go.id

2. Peningkatan Naskah Arsip Statis Digital melalui Simpul Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (**SIKN**) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (**JIKN**) pada 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung ditunjuk oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan jumlah Naskah Arsip Statis Digital menjadi 1 (satu) juta arsip. Pada Tahun 2024, Provinsi Lampung juga menjadi salah satu *Pilot Project* SIKN dan JIKN dari 7 Provinsi dengan Tema Koleksi Arsip Daerah Warisan Budaya dan Hasil Kerja Pemerintahan, dimana Provinsi Lampung telah mengunggah arsip dengan capaian 1.625 arsip, hal ini telah melebihi target yang ditentukan.

Gambar 3.2.14  
Serifikat SIKN 2024



Sumber Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024



## **2. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK)**

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Dalam mempercepat SPBE, pengawasan kearsipan juga diperlukan untuk mengukur kualitas pengelolaan arsip elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan ANRI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dan Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada Instansi Tingkat Pusat dan Pemerintahan Provinsi Tahun 2024.

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal dan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal. sesuai Perka ANRI No. 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan nilai bobot pengawasan internal 40% dan eksternal 60%, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada objek pengawasan.

Analisis pengukuran capaian Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2.18  
Pencapaian Sasaran dengan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan

Sasaran 2				
Sasaran 2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital			
IKU2	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan			
Satuan	Angka			
No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	2019	n/a	n/a	n/a
2	2020	n/a	n/a	n/a
3	2021	n/a	n/a	n/a
4	2022	n/a	n/a	n/a
5	2023	87,00	86,51	99,43%
6	2024	87,00	86,23	99,11%

**Grafik Pencapaian NHPK  
Pemprov Lampung:**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital memiliki indikator yaitu Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan dengan realisasi sebesar **86,23** dari target sebesar 87,00 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2024**. Berdasarkan target tersebut persentase capaian kinerjanya adalah 99,11%. Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menurun dari tahun sebelumnya, dengan capaian kinerja sebagai berikut: pada tahun 2023 mencapai **99,43%**, dan tahun 2024 mencapai **99,11%** dengan kategori “**Memuaskan**” dalam skala Nasional. Namun secara kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023.

Tabel 3.2.19  
Capaian Sasaran dengan NHPK (2024 – Nasional)

Sasaran 1		
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital	
IKU <sub>(1/20)</sub>	Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan	
Satuan	Angka	
	2024	Nasional
	Target	Capaian
	87,00	99,11
	Peringkat 10 skala Nasional	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024



Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung maka capaian kinerja Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan mencapai **99,11%**. Berdasarkan kategori Nasional maka Provinsi Lampung memperoleh peringkat 10 Besar untuk skala Nasional dalam Nilai hasil Pengawasan Kearsipan.

Berdasarkan realisasi Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, maka masih sangat diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan di daerah. Berikut tabel perbandingan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Tabel 3.2. 20  
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan (NHPK)  
Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota  
se-Provinsi Lampung Tahun 2024

NO.	PEMERINTAH DAERAH	PREDIKAT	INDEKS
		2024	
1	PROVINSI LAMPUNG	A	86,23
2	KOTA BANDAR LAMPUNG	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	23,89
3	KOTA METRO	BB	76,81
4	KABUPATEN LAMPUNG BARAT	D	18,85
5	KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	C	37,82
6	KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	D	26,03
7	KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	C	45,10
8	KABUPATEN LAMPUNG UTARA	C	33,56
9	KABUPATEN MESUJI	C	38,90
10	KABUPATEN PESAWARAN	D	27,60
11	KABUPATEN PESISIR BARAT	D	18,58
12	KABUPATEN PRINGSEWU	CC	58,14
13	KABUPATEN TANGGAMUS	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	6,37
14	KABUPATEN TULANG BAWANG	TIDAK DIBERIKAN KATEGORI	11,07
15	KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	C	30,22
16	KABUPATEN WAYKANAN	C	36,95

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Berdasarkan data pada tabel, dapat dilihat bahwa hanya Provinsi Lampung yang telah melaksanakan pengawasan Internal kearsipan dengan kategori A (Memuaskan), dan diikuti oleh Kota Metro dengan kategori BB (Sangat Baik), untuk Kabupaten/Kota lainnya secara umum memperoleh



kategori C (Cukup), dan D (Sangat Kurang). Sedang tiga Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Tulang Bawang tidak mendapatkan kategori dikarenakan tidak melaksanakan pengawasan kearsipan internal.

Dalam pengukuran Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan terdiri atas beberapa aspek nilai, yaitu nilai bobot pengawasan internal 40% dan nilai bobot pengawasan eksternal 60%,. Berikut adalah Tabel Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

Tabel 3.2.21  
Indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Arsip  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024

Nilai Hasil Pengawasan	NHP 2024	Bobot	NHP x Bobot
Eksternal	89,46	60%	53,68
Internal	81,37	40%	32,55
Nilai Akumulasi (NHPK)			86,23

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Nilai hasil pengawasn kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal pada Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebesar **86,23** atau dengan kategori **A “Memuaskan”**.

Aspek atau Komponen Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan bersumber dari Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal (ASKE) yang dilaksanakan oleh ANRI melalui Tim Pengawas Kearsipan Pusat. Nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal ini memiliki bobot 60%, Berikut Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024.



Tabel 3.2.  
Nilai Aspek/Komponen NHPK Eksternal  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024

NO	ASPEK/KOMPONEN	NILAI STANDAR	NILAI	BOBOT ASPEK (%)	NILAI AKHIR
1	ASPEK KEBIJAKAN	1100	1040	15%	14,18
2	ASPEK PEMBINAAN	2000	1540	25%	19,25
3	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DENGAN RETENSI SEKURANGKURANGNYA 10 (SEPULUH) TAHUN	800	800	10%	10,00
4	ASPEK PENGELOLAAN ARSIP STATIS	2300	2200	30%	28,70
5	ASPEK SUMBER DAYA KEARSIPAN	2400	2080	20%	17,33
	<b>TOTAL</b>	<b>8600</b>	<b>7660</b>	<b>100%</b>	<b>89,46 A (MEMUASKAN)</b>

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Berdasarkan Tabel diatas, Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan yang bersumber dari nilai hasil pengawasan kearsipan eksternal (ASKE) memperoleh nilai **89,46**. Nilai ini diperoleh dari bobot penilaian yang terdiri dari:

**1. Kebijakan Kearsipan (15%)**

terkait dengan Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Jadwal Retensi Arsip dan Program Arsip Vital, kebijakan terkait alih media, dan kebijakan terkait JIKN (Jaringan Informasi Kearsipan Nasional).

**2. Pembinaan Kearsipan (25%)**

Pembinaan kearsipan merupakan kegiatan pembinaan kearsipan, dengan maksud terciptanya tata Kelola kearsipan yang sesuai regulasi dan meningkatkan kualitas layanan prima kepada masyarakat atau pengguna arsip serta penyelamatan arsip



**3. Pengelolaan Arsip Inaktif Yang Memiliki Retensi Sekurang-Kurangnya 10 Tahun (10%)**

pengolahan inaktif adalah untuk menilai perkembangan setiap objek pengawasan terkait efektifitas pengelolaan arsip inaktif yang dipindahkan dari unit pengolah/unit kerja ke unit kearsipan.

**4. Pengelolaan Arsip Statis (30%)**

Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian arsip statis secara efisien, efektif dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan dan pelayanan publik dalam suatu sistem kearsipan nasional. penyelamatan arsip.

**5. Sumber Daya Kearsipan mencakup Organisasi, SDM kearsipan, Sarana dan Prasarana, dan Pendanaan (20%)**

Sumber daya kearsipan adalah dukungan terhadap sistem kearsipan nasional berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan.

Aspek atau Komponen Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan juga bersumber dari nilai hasil pengawasan kearsipan internal (ASKI) yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Daerah terhadap unit pengolah dan unit kearsipan tiap perangkat daerah/entitas Pemerintah provinsi dan diverifikasi oleh ANRI. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal ini memiliki bobot 40%, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024 memperoleh nilai **81,37** untuk Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Intenal. Nilai ini diperoleh dari bobot penilaian yang terdiri dari:

**1. Pengelolaan Arsip Dinamis (40%)**

pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

**a. Penciptaan (40%)**



Penciptaan arsip dapat diartikan sebagai aktivitas membuat rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk dan media apapun sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi:

- Kesesuaian pembuatan naskah dinas dengan Pergub Lampung Nomor 14 /2014.
- Ketersediaan buku agenda dan ekspedisi naskah dinas masuk ke Unit Pengolah.
- Ketersediaan buku agenda dan ekspedisi naskah dinas keluar dari Unit Pengolah.

b. Penggunaan (20%)

Penggunaan arsip adalah keluarnya arsip dari tempat penyimpanan karena diperlukan oleh seseorang untuk kepentingan tertentu, sesuai maksud dan tujuan penciptaannya. Arsip yang sudah disimpan sering kali dicari kembali karena akan digunakan untuk keperluan tertentu, meliputi:

- Ketersediaan arsip aktif di Unit Pengolah.
- Ketersediaan buku dan formulir peminjaman arsip aktif.
- Kesesuaian penggunaan arsip aktif dengan Pergub Lampung Nomor 17/2023.

c. Pemeliharaan (20%)

Pemeliharaan Arsip Dinamis adalah kegiatan menjaga keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun informasinya yang meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, dan Alih Media Arsip, meliputi:

- Ketersediaan arsip aktif yang terberkas sesuai Pergub Lampung Nomor 16/2023.
- Ketersediaan Daftar Arsip Aktif yang terdiri dari Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas.
- Ketersediaan Daftar Arsip Vital (jika menciptakan arsip vital).



d. Penyusutan (20%)

penyusutan arsip untuk menilai perkembangan kegiatan penyusutan arsip pada masing-masing OPD. Kegiatan penyusutan arsip meliputi pemindahan arsip inaktif, pemusnahan arsip dan penyerahan arsip statis oleh OPD kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan, meliputi:

- Ketersediaan Daftar Arsip Inaktif Yang Dipindahkan.
- Ketersediaan Berita Acara Pemindahan Arsip Inaktif.

**2. Sumber Daya Kearsipan (60%)**

Sumber daya kearsipan adalah dukungan terhadap sistem kearsipan nasional berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan, meliputi:

a. SDM kearsipan (40%)

sumber daya kearsipan adalah manusia yang mampu bekerja dan memiliki keahlian dan kompetensi dalam melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, statis maupun pembinaan kearsipan.

sumber daya manusia (SDM) kearsipan untuk menilai perkembangan pemenuhan jumlah, kompetensi, tugas dan tanggung jawab pejabat struktural, arsiparis dan pengelola arsip, meliputi:

- Ketersediaan SK Arsiparis atau SK/Sprin Pengelola Arsip di Unit Pengolah.
- Ketersediaan STTPL Diklat Kearsipan.
- Ketersediaan Sertifikat kegiatan pengembangan kompetensi (bimtek, dls).



b. Prasarana dan sarana kearsipan (60%).

sarana prasarana kearsipan adalah segala peralatan dan perlengkapan, serta fasilitas yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang jalannya kegiatan pengelolaan arsip.

prasarana dan sarana kearsipan untuk menilai perkembangan ketersediaan, fungsionalitas dan fasilitas sarana dan prasarana kearsipan, meliputi:

- Ketersediaan Pusat Penyimpanan Arsip Inaktif di Unit Kearsipan (*Record Center*).
- Ketersediaan *fire alarm, heat/smoke detector, hydrant* atau APAR di *Record Center*.
- Ketersediaan dan kesesuaian penggunaan rak penyimpanan arsip inaktif.
- Ketersediaan dan kesesuaian penggunaan boks/*can* penyimpanan arsip inaktif.
- Ketersediaan dan kesesuaian penggunaan *AC, dehumidifier*, dan *thermohygrometer* di *Record Center*.
- Ketersediaan *CCTV* dan kontrol akses pintu *Record Center*.

Data penilaian internal kearsipan digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan arsip di dalam suatu lembaga atau organisasi. Berikut beberapa aspek yang dinilai dalam penilaian internal kearsipan:

- a. Jumlah unit pengolah/unit kearsipan yang memperoleh penilaian kinerja minimal baik. Hal ini menunjukkan seberapa baik kinerja unit pengolah atau unit kearsipan dalam mengelola arsip.
- b. Jumlah unit pengolah yang mampu menyusun daftar arsip vital. Hal ini menunjukkan kemampuan unit pengolah dalam mengidentifikasi dan mengelola arsip yang sangat penting atau vital.



- c. Tersedianya sarana penyimpanan arsip elektronik, hal ini menunjukkan ketersediaan infrastruktur yang memadai untuk menyimpan arsip elektronik.
- d. Tersedianya Tim Helpdesk dan layanan helpdesk, hal ini menunjukkan ketersediaan dukungan teknis dan layanan bantuan untuk pengelolaan arsip.

Penilaian internal Kearsipan dapat membantu lembaga atau organisasi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan arsip dan memastikan bahwa arsip yang sangat penting atau vital dapat terjaga dengan baik.

Dalam rangka Pengawasan dan Penilaian Internal Kearsipan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan program kegiatan yang mendukung kinerja pencapaian Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan yang Optimal. Berikut langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung selama Tahun 2024.

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selama periode Tahun 2024, telah melaksanakan Pengawasan Sistem Kearsipan Internal yang dilakukan oleh Tim Pengawas Kearsipan Daerah Provinsi Lampung yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/154/V.18/HK/2024 dan secara operasional dilaksanakan oleh 3 (tiga) Sub Tim dengan komposisi setiap sub tim terdiri dari 1 (satu) orang ketua sub tim dan 2 (dua) orang anggota sub tim, dan dilaksanakan selama bulan Februari hingga Juni 2024 terhadap 48 Unit Pengolah dan 40 Unit Kearsipan sebagai Objek Pengawasan Kearsipan Internal di 48 Perangkat Daerah.
2. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Internal Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan

(PKPKT) Tahun 2024. Rakor yang diikuti 96 peserta. Rakor digelar di Ruang Aula Utama Lantai 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.52, Kedaton Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari 2024. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan agenda pengawasan kearsipan internal terhadap 48 perangkat daerah yang dilaksanakan tanggal 6 Maret hingga 4 Juli 2024.

Gambar 3.2.15  
Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Internal Tahun 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

### 3. Audit Kearsipa Internal

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan kearsipan internal secara langsung terhadap 134 (seratus tiga puluh empat) objek pengawasan kearsipan yang terdiri dari 94 (sembilan puluh empat) Unit Pengolah dan 40 (empat puluh) Unit Kearsipan II pada 48 (empat puluh delapan) Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret hingga 4 Juli 2024.

Gambar 3.2.16  
Audit Kearsipan Internal di Perangkat Daerah  
Provinsi Lampung tahun 2024



*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024*

4. Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Eksternal Tahun 2024. Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT) Tahun 2024. Rakor yang diikuti 45 peserta ini digelar di Ruang Aula Literasi Lantai 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.52, Kedaton Bandar Lampung pada tanggal 26 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan agenda pengawasan kearsipan eksternal terhadap 15 (lima belas) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Juli hingga 28 Agustus 2024. Pada kesempatan ini juga disampaikan bahwasanya Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan, yang selanjutnya menjadi salah satu sumber untuk menentukan indeks reformasi birokrasi suatu instansi.



Gambar 3.2.17  
Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan (PKPKT)  
Eksternal Tahun 2024



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

## 5. Audit Kearsipan Eksternal

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan kearsipan eksternal secara langsung terhadap 15 (lima belas) Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada tanggal 30 Juli hingga 28 Agustus 2024.

Gambar 3.2  
Audit Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024



Audit Kearsipan Eksternal di LKD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2024

Audit Kearsipan Eksternal di LKD Kabupaten Pesawaran tahun 2024



Audit Kearsipan Eksternal di LKD Kabupaten Lampung Timur tahun 2024

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024

6. Bimbingan Pengelolaan Arsip Dinamis bagi Pengelola Arsip Perguruan Tinggi Swasta, Dalam rangka memberikan pemahaman tentang pengelolaan arsip dinamis bagi pengelola arsip perguruan tinggi swasta, maka diadakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip bagi Perguruan Tinggi Swasta. Arsip adalah salah satu komponen penting dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi yang baik, pengelolaan arsip yang efektif tidak hanya membantu menjaga rekam jejak sejarah institusi, tetapi juga mendukung transparansi, akuntabilitas dan efisiensi administrasi dalam era digital saat ini, penting bagi setiap Perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Swasta untuk memahami dan menerapkan manajemen arsip yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan regulasi pemerintah. Bimbingan Teknis ini dilaksanakan di Ruang Aula Literasi Lantai 2 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.52, Kedaton Bandar Lampung pada tanggal 10 Oktober 2024.

Gambar 3.2.19  
Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis bagi TU SMA/SMK tahun 2024



*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2024*

7. Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024. Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 adalah sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerja akuntabilitas kearsipan kepada Perangkat Daerah dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan tertib arsip di Unit Kerja masing-masing dengan tujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan dengan mendorong Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar lebih meningkatkan tata kelola kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan. Peserta Rakor Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2024 berjumlah 160 orang yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan LKD 15 Kab/Kota 45 orang, 48 Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung 96 orang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung 19 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 28 November 2024 di Ruang Aula Utama Lantai 3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung

Gambar 3.2.20  
Rapat Koordinasi (Rakor) Penyampaian Hasil Pengawasan Kearsipan  
Provinsi Lampung Tahun 2024



*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024*

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat, berikut adalah Tabel Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan



Program/Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai Aksi pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital.

Table 3.2.23  
Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Aksi dengan indikator NHPK

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program/Kegiatan yang Telah Dilaksanakan
<p>i. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah terhadap pengelolaan arsip,</p> <p>2. Jumlah tenaga fungsional arsiparis masih kurang</p> <p>3. Di bidang Kearsipan, banyak arsip yang belum terkelola dengan baik di unit-unit kerja karena belum adanya tenaga fungsional arsiparis atau petugas khusus yang menangani kearsipan</p> <p>4. Belum semua Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung sadar dan menyerahkan serta menitipkan arsip statis ke Lembaga Kearsipan</p> <p>5. Penyelamatan arsip bernilai sejarah kurang intensif</p> <p>6. Perlindungan dan pengamanan terhadap arsip vital belum efektif</p> <p>7. Terkendalanya sosialisasi dan pembinaan kearsipan pada Instansi Pemerintah dan Swasta, yang disebabkan terbatasnya anggaran</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Adanya Regulasi tentang Kearsipan</li><li>2. Pelaksanaan penataan kearsipan berdasarkan kodefikasi dan klasifikasi</li><li>3. Semakin meningkatnya OPD yang sadar arsip</li><li>4. Komitmen stakeholder untuk pengelolaan arsip berbasis TIK</li></ol>	<p>-Melakukan sosialisasi dan pembinaan kearsipan bagi aparatur pemerintah</p> <p>-Melaksanakan Pengawasan terutama dalam implementasi Arsip Digital.</p>	<p>Program Unggulan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mendukung upaya penerapan aplikasi Srikandi yang diluncurkan Pemerintah sebagai aplikasi umum bidang kearsipan yang dapat mendukung pengelolaan arsip dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik.</li></ol> <p>Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</li><li>2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</li><li>3. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</li></ol>

Berdasarkan beberapa faktor pendukung dan penghambat yang ada , maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memberikan rekomendasi/implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan Indeks Digitalisasi Arsip dan Nilai Tingkat Gemar Membaca adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan arsip vital keseluruh perangkat daerah hingga menghasilkan daftar arsip.



- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan keseluruhan perangkat daerah dengan target pengawasan internal mendapatkan kategori B (Baik).
- Mendorong peningkatan penggunaan Aplikasi SRIKANDI keseluruhan perangkat daerah dalam transaksi internal dan eksternal kearsipan.
- Meningkatkan Jumlah dan Kompetensi Arsiparis melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan, sertifikasi dalam jabatan dan atau teknis tertentu yang diselenggarakan ANRI.
- Mendorong peningkatan anggaran belanja proporsional untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung indeks Digitalisasi Arsip Provinsi Lampung agar tetap dapat mempertahankan posisi kategori memuaskan dalam skala Nasional.

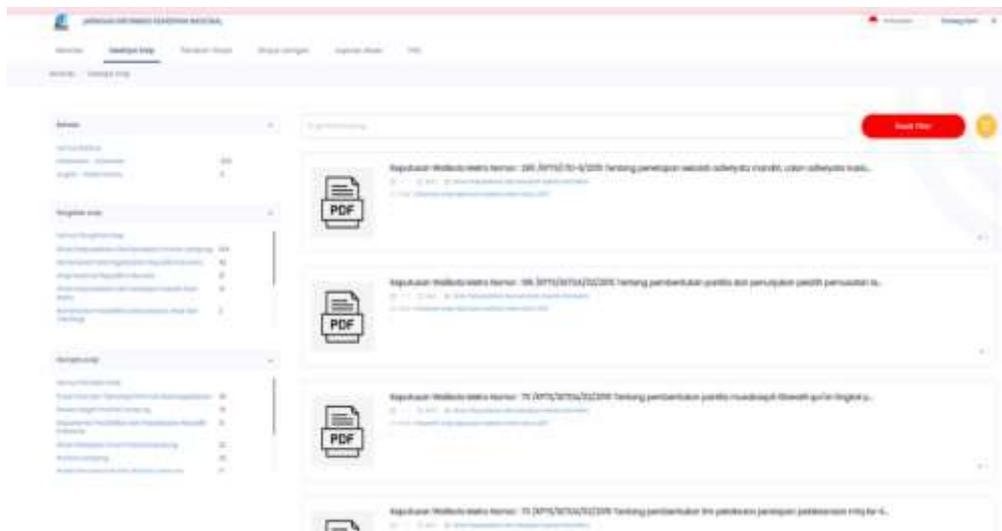
Program Unggulan dalam rangka meningkatkan Indeks Digitalisasi Arsip Tahun 2024 antara lain :

1. Implementasi Aplikasi **SRIKANDI** (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) pada Perangkat Daerah dan Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Pada tahun 2024 terdapat catatan terkait SRIKANDI, dikarenakan belum semua perangkat daerah menggunakannya (mulai dari pembuatan dan penerimaan, hingga pemberkasan). Evaluasi Aplikasi SRIKANDI meliputi Pengelolaan Arsip Dinamis sampai pada tahap pemberkasan. Pada Tahun 2024, dari jumlah OPD Provinsi Lampung baru terdapat 2 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan hingga tahap pemberkasan, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Sampai dengan saat ini jumlah arsip yang telah diciptakan di Provinsi Lampung pada Aplikasi SRIKANDI sebanyak 36.347.810 Naskah Masuk dan 33,269,917 Naskah Keluar.
2. Peningkatan Naskah Arsip Statis Digital melalui Simpul Jaringan Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (**SIKN**) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (**JIKN**) pada 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi



Lampung. Pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung ditunjuk oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dalam rangka meningkatkan jumlah Naskah Arsip Statis Digital menjadi 1 (satu) juta arsip. Pada Tahun 2024, Provinsi Lampung juga menjadi salah satu *Pilot Project* SIKN dan JIKN dari 7 Provinsi dengan Tema Koleksi Arsip Daerah Warisan Budaya dan Hasil Kerja Pemerintahan, dimana Provinsi Lampung telah mengunggah arsip dengan capaian 1.625 arsip, hal ini telah melebihi target yang ditentukan.

Gambar 3.2.21  
Data Arsip Unggah di SIKN 2024



Sumber : [sikn.anri.go.id](http://sikn.anri.go.id)

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada tahun 2024 memiliki pagu anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 16.780.520.721,85,- Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 16.363.923.610,- atau sebesar 97,52%.



Tabel 3.3.1  
Realisasi Anggaran per-IKU Tahun 2024

No	IKU	P-APBD	Realisasi	%
1	IPLM dan Nilai TGM	16.106.503.095,85	15.702.694.424,00	97,49
2	Niali TDGAdan NHPK	674.017.626,00	661.229.186,00	98,10

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, 2024

Efisiensi dan efektivitas adalah hubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Berikut Perincian penggunaan anggaran pada setiap indikator kinerja utama berdasarkan dokumen realisasi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024:

Tabel 3.3.2  
Pagu dan Realisasi Anggaran  
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024

INIKATOR KNERJA UAMA	KINERJA				ANGGARAN		
	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	P-APBD	Realisasi	%
<b>INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) DAN NILAI TINGKAT GEMAR MEMBACA (TGM)</b>					<b>16.106.503.095,85</b>	<b>15.702.694.424,00</b>	<b>97,49</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>				100	<b>15.028.506.596</b>	<b>14.644.554.924</b>	<b>97,45</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				100	<b>71.396.645,89</b>	<b>71.115.100</b>	<b>99,61</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	14	14	100	20.609.645,89	<b>20.560.000</b>	<b>99,76</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dokumen	4	4	100	25.787.000	<b>25.597.200</b>	<b>99,26</b>
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	8	8	100	25.000.000	<b>24.957.900</b>	<b>99,83</b>
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				100	<b>11.718.453.141</b>	<b>11.414.320.803</b>	<b>97,40</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	org	93	93	100	11.644.890.140,85	11.341.130.803	<b>97,39</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dokumen	2	2	100	33.563.000	33.452.000	<b>99,67</b>



INIKATOR KNERJA UAMA	KINERJA				ANGGARAN		
	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	P-APBD	Realisasi	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	dokumen	6	6	100	40.000.000	39.738.000	99,35
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>				100	<b>30.000.000</b>	<b>29.607.050</b>	<b>98,69</b>
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	100	15.000.000	14.804.050	98,69
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	1	1	100	15.000.000	14.803.000	98,69
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>10.000.000</b>	<b>9.870.000</b>	<b>98,70</b>
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	10	10	100	10.000.000	9.870.000	98,70
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				100	<b>1.152.119.410,11</b>	<b>1.132.907.893</b>	<b>98,33</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket	1	1	100	14.943.947,11	14.943.300	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	1	1	100	350.846.788,00	342.660.000	97,67
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	1	1	100	162.232.000,00	151.530.000	93,40
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	paket	2	2	100	20.000.000,00	20.000.000	100,00
Penyediaan Bahan / Material	paket	30	30	100	60.000.000,00	59.973.300	99,96
Fasilitas Kunjungan Tamu	laporan	12	12	100	83.600.000,00	83.567.000	99,96
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	15	15	100	460.496.675,00	460.234.293	99,94
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				100	<b>1.391.500.399,00</b>	<b>1.357.680.770</b>	<b>97,57</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	laporan	12	12	100	649.600.000,00	649.380.770	99,97
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	laporan	12	12	100	741.900.399,00	708.300.000	95,47
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>					<b>655.037.000</b>	<b>629.053.308</b>	<b>96,03</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	8	8	100	647.037.000,00	621.143.308	96,00
Pemeliharaan Peralatan mesin lainnya	unit	8	8	100	8.000.000	7.910.000	98,88
<b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>					<b>954.478.000</b>	<b>935.359.600</b>	<b>98,00</b>
<b>Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi</b>					<b>670.398.000</b>	<b>664.412.100</b>	<b>99,11</b>
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	jenis	3	3	100	161.816.000	161.016.000	99,51



INIKATOR KNERJA UAMA	KINERJA				ANGGARAN		
	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	%	P-APBD	Realisasi	%
Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah Provinsi	unit	15	15	100	43.466.000	40.821.000	93,91
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	layanan	12	12	100	245.116.000	242.829.900	99,07
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	eksemplar	2510	2510	100	220.000.000	219.745.200	99,88
<b>Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi</b>				90	<b>284.080.000</b>	<b>270.947.500</b>	<b>95,38</b>
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	lokus	15	12	80	215.000.000,00	213.374.000	99,24
Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	layanan	2	2	100	69.080.000	57.573.500	83,34
<b>PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO</b>				100	<b>123.518.500</b>	<b>122.779.900</b>	<b>99,40</b>
<b>Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi</b>				100	<b>70.796.500</b>	<b>70.580.300</b>	<b>99,69</b>
Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	eksemplar	2	2	100	70.796.500	70.580.300	99,69
<b>Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliograf Daerah</b>				100	<b>52.722.000</b>	<b>52.199.600</b>	<b>99,01</b>
Penerbitan Katalog Induk Daerah	dokumen	100	100	100	52.722.000	52.199.600	99,01
<b>INDEKS DIGITALISASI ARSIP (TDGA) DAN NILAI HASIL PENGAWASAN INTERNAL (NHPK)</b>				100	<b>674.017.626</b>	<b>661.229.186</b>	<b>98,10</b>
<b>PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP</b>				100	<b>674.017.626</b>	<b>661.229.186</b>	<b>98,10</b>
<b>Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi</b>				100	<b>56.441.000</b>	<b>56.402.800</b>	<b>99,93</b>
Penyusutan Arsip Dinamis	arsip	2000	2000	100	25.105.000	25.104.400	100,00
Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	arsip	300	300	100	31.336.000	31.298.400	99,88
<b>Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi</b>				100	<b>157.379.000</b>	<b>155.084.600</b>	<b>98,54</b>
Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	arsip	160	160	100	84.340.000	82.084.200	97,33
Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	arsip	160	160	100	73.039.000	73.000.400	99,95
<b>Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi</b>				100	<b>460.197.626</b>	<b>449.741.786</b>	<b>97,73</b>
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	pengguna	160	160	100	30.000.000	29.972.000	99,91
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	laporan	48	48	100	430.197.626	419.769.786	97,58
<b>JUMLAH</b>				<b>99,41</b>	<b>16.780.520.721,85</b>	<b>16.363.923.610,00</b>	<b>97,52</b>



Dari tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran yang mendukung misi daerah. Berdasarkan hasil evaluasi di atas terlihat bahwa di Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mencapai tingkat capaian kinerja fisik sebesar **99,41%** dengan tingkat capaian kinerja anggaran sebesar **97,52%**. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara *efektif dan efisien*, dimana tingkat capaian kinerja fisik lebih besar dibandingkan tingkat capaian kinerja anggaran.

*Refocussing* Anggaran merupakan proses peninjauan ulang dan pengalihan alokasi anggaran dari kegiatan yang dianggap kurang prioritas ke program-program yang lebih mendesak dan relevan. *Refocussing* Anggaran pada Tahun 2024 oleh Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan sebagai upaya memprioritaskan anggaran pada program tertentu dalam pencapaian sasaran strategis. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Tahun 2024 mengalami *Refocussing* Anggaran, khususnya pada anggaran yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, *Refocussing* Anggaran dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.3.3  
Tabel *Refocussing* Anggaran Tahun 2024

NO	IKU	APBD	P.APBD	(%)
1.	INDEKS PEMBNGUNAN LITERASI MASYARAKAT (IPLM) DAN NILAI TINGKAT GEMAR MEMBACA (TGM)	16.275.852.900.70	16.106.503.095,85	-1,04%
2.	INDEKS DIGITALISASI ARSIP (TDGA) DAN NILAI HASIL PENGAWASAN KEARSIPAN (NHPK)	931.036.000	674.017.626	-27,61%
	TOTAL	17.206.888.900.70	16.780.520.721,85	-2,48%



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung, 2024

Berdasarkan Tabel diatas, pada Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan dan Kearsipan mengalami Refocussing anggaran, dimana untuk anggaran yang mendukung untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami pengurangan dikarenakan untuk pelaksanaan program prioritas lainnya oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini dapat dilihat dari anggaran untuk Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Membaca yang mengalami penurunan sebesar 1,04%, dan anggaran untuk Indeks Digitalisasi Arsip serta Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan yang menurun sebesar 27,61%. Total Penurunan anggaran pada Perubahan APBD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung sebagai bentuk *Refocussing* Anggaran adalah sebesar 2,48% dari anggaran pada APBD Tahun 2024.

### 3.4. Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Berdasarkan Surat Kemenpan RB tanggal 3 September 2024 Nomor: B/175/AA.05/2024 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024 Provinsi Lampung telah menindaklanjuti terkait beberapa rekomendasi guna lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

Tabel 3.4.1  
Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun 2024

No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah tahun 2025.  a. Agar melakukan evaluasi terkait konsistensi pagu yang ada didalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2025 RKA dan KUA-PPAS Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2025	Telah dilakukan audiensi dengan Tim TAPD Provinsi Lampung dan sudah bersurat terkait penambahan anggaran untuk mendukung indikator kinerja utama serta	perubahan anggaran 2025 dan atau renja 2026	Juli 2025	Kepala dinas & para Pejabat Adminstrator dilingkungan Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung	dilakukan secara berkala



No	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
	b. Menyusun dan atau memperbaiki kerangka acuan kerja kegiatan/sub kegiatan	untuk menyesuaikan pagu anggaran dengan anggaran yang tertera dalam RKPDP Provinsi Lampung hingga saat ini belum bisa diluluskan karena keterbatasan anggaran yang ada pada pemerintah Provinsi Lampung.  Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melakukan perubahan dan revisi terkait kerangka acuan kerja.	1 bulan setelah perubahan	1bulan	Pejabat Administrator dilingkungan Dinas Perpustakaan Provinsi Lampung	dilakukan secara berkala

Berdasarkan laporan Hasil Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2025 dijabarkan pada tabel tindak lanjut diatas.

Tindak Lanjut LHE Nilai SAKIP Perangkat Daerah dapat dilihat pada linkberikut:<https://drive.google.com/drive/folders/1gbzkyQlnKQ7lha5PMt5iTVJeUMb21QL0>

Gambar 3.4.1  
LHE AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2024



1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 30 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai 24,60.
  2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 30 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai 21;
  3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 15 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai 10,50.
  4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, untuk komponen ini dengan kontribusi bobot sebesar 25 dari nilai secara keseluruhan mendapatkan nilai 15,5.
- Sehingga Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2023 secara keseluruhan mendapatkan nilai 71,15 dengan predikat **BB** dan Interpretasi **"Sangat Baik"**.





Berdasarkan LHE AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung Tahun 2023 oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Tim Pengawas Inspektorat Nomor 700/31.LHE/IV.01/20/2014 tanggal 19 Juni 2024, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memperoleh nilai **71,15** dengan predikat **BB** dan interpretasi **Sangat Baik**.

### 3.5. Inovasi

Pada Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mempunyai 3 inovasi daerah, yaitu Pojok Baca Digital (POCADI), e-Perpus Lampung dan Tugu Baca.

#### a. e-Perpus Lampung

Di tengah era digital yang terus berkembang semakin pesat, diperlukan adanya inovasi baru dalam bidang perpustakaan agar pengetahuan masyarakat senantiasa ternutrisi. Aplikasi perpustakaan digital ini per tanggal 21 Desember 2020 memiliki 5.227 salinan buku digital dan 2.397 judul buku. Jumlah pengguna yang mengunduh ePerpus Lampung dan jumlah pengunjung di ePerpus Lampung diharapkan terus meningkat setiap harinya. Hal ini membuktikan bahwa perpustakaan harus bisa mengikuti zaman agar senantiasa mendapat tempat di hati masyarakat yang dapat dibaca secara online dimanapun dan kapanpun. Walaupun saat ini hanya melayani peminjaman dan pengembalian koleksi secara offline dengan pembatasan tidak melayani baca buku ditempat, tetapi pemustaka tetap bisa memanfaatkan fasilitas layanan koleksi melalui layanan digital (online).

e-Perpus Lampung merupakan aplikasi perpustakaan digital berbasis media sosial yang dapat diakses melalui beragam perangkat seperti gawai, tablet, laptop, dan komputer.

Gambar 3.5.1  
Tampilan Halaman Download E-Perpus Lampung



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

e-Perpus Lampung ini dapat diinstal melalui 2 (dua) cara yaitu melalui versi Android dan versi Windows dengan fitur-fitur aplikasi yang menarik dan bermanfaat sehingga membaca menjadi lebih menarik dan mengasyikan.

Versi Android dapat diinstal melalui Playstore di perangkat smartphone dengan kata kunci ePerpus Lampung. Kemudian melakukan registrasi jika belum memiliki akun dan Sign In jika sudah memiliki akun.

Langkah-langkah melakukan registrasi/pendaftaran adalah mengisi form dengan lengkap dan benar dan klik kirim registrasi. Setelah berhasil silahkan cek email sesuai email yang didaftarkan untuk diverifikasi. Lakukan AKTIVASI email dengan cara membuka email yang didaftarkan Lalu buka email yang telah dikirimkan oleh sistem dengan nama akun :no-reply@kubuku.co.id. Setelah itu klik link AKTIVASI yang ada di dalam email. Akun yang telah diaktivasi selanjutnya menunggu admin perpustakaan untuk menerima permintaan pendaftaran. Setelah pendaftaran di terima oleh admin perpustakaan maka akan ada pemberitahuan akun sudah di terima. Silahkan melakukan login pada aplikasi. Setelah melakukan Registrasi maka dapat melakukan Sign In/Login. Masukkan email dan kata sandi sesuai dengan data Registrasi yang telah dilakukan untuk dapat masuk ke Aplikasi.

Gambar 3.5.2  
Tampilan aplikasi di perangkat Android



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Sedangkan untuk download aplikasi versi Windows di perangkat PC/laptop adalah :

1. Membuka Internet Browser
2. Kemudian ketik link <https://kubuku.id/download/eperpus-lampung>
3. Pilih tombol unduh aplikasi Versi Windows kemudian unduh aplikasi

Untuk install aplikasi di perangkat PC/Laptop adalah buka folder tempat file yang telah terunduh dan klik file setup.exe untuk memulai install kemudian pilih I accept the agreement lalu klik tombol Next, proses install selesai. Langkah melakukan registrasi/pendaftaran sama seperti di perangkat Android.

#### b. **Pojok Baca Digital (POCADI)**

Gambar 3.5.3  
Pojok Baca Digital di PT KAI Stasiun Tanjung Karang



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024

Pojok baca digital telah merevolusi cara orang mengakses dan menikmati bacaan dengan menyediakan akses yang lebih mudah dan lebih luas ke berbagai sumber informasi, sering kali dengan biaya yang lebih rendah dan dengan kemudahan akses yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada tahun 2023 memberikan bantuan pojok baca digital kepada 12 (dua belas) Perpustakaan Desa, Sekolah, Pondok Pesantren di 7 Kabupaten/Kota. Serta pada tahun 2022 melalui CSR Bank Lampung, memberikan bantuan pojok baca digital kepada 4 lembaga pelayanan publik yaitu PT. KAI, Rumah Sakit Umum Abdoel Moeloek dan PT. Angka Pura II Bandara Raden Intan II DAN Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung.

### c. Titik Baca

Gambar 3.5.4  
Titik Baca Tematik Literasi Keuangan



Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Desember 2024



Seperti layaknya pojok baca dengan rak dan buku bacaan konvensional yang ada di ruang publik, Titik Baca memungkinkan masyarakat yang sedang singgah di titik tersebut untuk membaca bahan bacaan yang ada dan meletakkan kembali bahan bacaannya ketika mereka akan meninggalkan lokasi tersebut. Hanya saja, dalam konsep Titik Baca, rak buku berbentuk tugu berisi QR Code dan bahan bacaan dalam bentuk buku digital. Masyarakat pun tidak perlu mengembalikan buku bacaannya ke dalam rak karena akses terhadap Titik Baca akan secara otomatis terputus ketika ia meninggalkan lokasi Titik Baca tersebut. Titik Baca memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan bahan bacaan tanpa harus mengunduh aplikasi dan mendaftarkan dirinya sebagai anggota. Pada tahun 2023 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menghibahkan 2 titik baca yakni di SMA N 2 Bandar Lampung dan SMAN 1 Pagelaran, Pringsewu. Sedangkan pada tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung juga memiliki 1 unit Titik Baca dengan konten tematik terkait literasi keuangan.

### **3.6. Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024**

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengeluarkan hasil penilaian terhadap indeks tingkat digitalisasi arsip pemerintah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Penilaian dari ANRI ini dilakukan untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif. Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Tim Pengawas Kearsipan Daerah telah melaksanakan audit pengelolaan arsip elektronik pada pemerintah kabupaten/kota sebagai pengemban level meso indikator evaluasi reformasi birokrasi general.

Pada Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mendapatkan prestasi dalam pengelolaan Arsip Digital (Nilai



Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip) dalam mendukung pencapaian Nilai Reformasi Birokrasi yang dicanangkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatatur dan Reformasi Birokrasi.

Selain itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memperoleh nilai A (Memuaskan) dalam Penilaian Hasil pengawasan kearsipan eksternal dan verifikasi hasil pengawasan kearsipan internal Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Lampung yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kearsipan ANRI dan menempati Peringkat 10 Tingkat Nasional.

Gambar 3.6.1  
Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Kategori Provinsi

V. PEMERINTAH PROVINSI

NO.	NAMA PROVINSI	KATEGORI
1	Jawa Tengah	AA (SANGAT MEMUASKAN)
2	Daerah Istimewa Yogyakarta	AA (SANGAT MEMUASKAN)
3	Jawa Barat	AA (SANGAT MEMUASKAN)
4	DKI Jakarta	AA (SANGAT MEMUASKAN)
5	Jawa Timur	AA (SANGAT MEMUASKAN)
6	Riau	AA (SANGAT MEMUASKAN)
7	Jambi	AA (SANGAT MEMUASKAN)
8	Bengkulu	AA (SANGAT MEMUASKAN)
9	Sumatera Selatan	AA (SANGAT MEMUASKAN)
10	Lampung	A (MEMUASKAN)
11	Sulawesi Selatan	A (MEMUASKAN)
12	Kalimantan Selatan	A (MEMUASKAN)
13	Kalimantan Barat	A (MEMUASKAN)
14	Banten	BB (SANGAT BAIK)
15	Kepulauan Riau	BB (SANGAT BAIK)
16	Aceh	BB (SANGAT BAIK)
17	Sumatera Utara	BB (SANGAT BAIK)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (B2ES), Badan Siber dan Sandi Negara

Dalam perlombaan Roket Air Nasional Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BRIN, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mengirimkan 16 peserta lomba dan berhasil meraih juara 1, 2, dan 3 yakni Ashya Peringkat I Rosadah IP (SMP Al Kautsar Bandar Lampung), Peringkat II Elvita Mega Fitri (SMA YP UNILA Bandar

Lampung), dan Peringkat III Aurel Febria Sari (SMP Kartika 2 Bandar Lampung).

Ketiga Juara dari Provinsi Lampung akan mewakili Indonesia di ASEAN Water Rocket Competition di Thailand pada bulan Januari 2025mendatang.

Gambar 3.6.2  
Juara Lomba Roket Air Nasional 2024





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja ( LKJ ) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Lampung Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Lampung Tahun 2024. Pembuatan LKJ ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJ Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Lampung Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Sasaran kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas 2 (dua) sasaran kinerja, yaitu yang ke-1 (kesatu) adalah Meningkatnya Budaya Gemar Membaca di Masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Gemar Membaca, dan yang ke-2 (kedua) adalah Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dengan indikator Indeks Digitalisasi Arsip dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan.

Sasaran kesatu terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu yang pertama adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, dengan nilai realisasi sebesar 64,81 atau dengan nilai capaian sebesar 97,06% dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 66,77. Dinas



Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada tahun 2024 memperoleh nilai **sedang** dalam pencapaian indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dalam skala Nasional.

Indikator yang kedua yaitu Tingkat Gemar Membaca, dengan nilai realisasi sebesar 67,67 atau dengan nilai capaian sebesar 101,35% dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 yaitu sebesar 66,77. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada tahun 2024 memperoleh nilai **sedang** dalam pencapaian indikator Nilai Tingkat Gemar Membaca dalam skala Nasional.

Sasaran kedua terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Indikator Nilai Digitalisasi Arsip, dengan nilai realisasi Tahun 2024 sebesar 87,63 dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 88,00. Secara umum, capaian kinerja indikator Nilai Digitalisasi Arsip adalah sebesar 99,58% dari target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, serta mendapat predikat **memuaskan** berdasarkan perbandingan realisasi dalam skala Nasional, meskipun mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2023.

Indikator yang kedua adalah Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan, dengan nilai realisasi Tahun 2024 sebesar 86,23 dari target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 87,00. Meskipun mengalami penurunan kinerja dari tahun sebelumnya, capaian kinerja indikator Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan adalah sebesar 99,11% dari target yang telah ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, serta mendapat predikat **memuaskan** berdasarkan perbandingan realisasi dalam skala Nasional.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung pada tahun 2024 memiliki pagu anggaran yang mendukung Indikator Kinerja Utama berdasarkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024



sebesar Rp. 16.780.520.721,85,- Realisasi anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 16.363.923.610,- atau sebesar 97,52%.

Berdasarkan hasil evaluasi terlihat bahwa di Tahun 2024 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung mencapai tingkat capaian kinerja fisik sebesar **99,41%** dengan tingkat capaian kinerja anggaran sebesar **97,52%**. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan secara *efektif dan efisien*, dimana tingkat capaian kinerja fisik lebih besar dibandingkan tingkat capaian kinerja anggaran.

## 2. Rekomendasi

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memberikan rekomendasi/implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai Tingkat Gemar Membaca adalah sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Lampung Perlu segera merealisasikan komitmen Kepala Daerah untuk mempercepat program peningkatan perpustakaan menjadi Perpustakaan moderen dengan memberikan support berupa pengadaan buku buku konvensional atau buku digital sesuai standar perpustakaan Nasional serta pemenuhan meubeler berupa meja, kursi rak buku sebagai penunjang layanan perpustakaan untuk meningkatkan layanan literasi bagi masyarakat;
- Mendorong peningkatan anggaran belanja proporsional untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung indek pembangunan literasi masyarakat Provinsi Lampung yang masih dibawah skala Nasional;
- Mendorong inovasi dan kreatifitas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terkait program literasi digital bagi masyarakat hingga ke pelosok desa,



mengingat program dari OPD terkait terkesan masih *copy-paste* dari Program Pemerintah Pusat dan kurang bermuatan kearifan lokal.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung memberikan rekomendasi/implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan Nilai Digitalisasi Arsip dan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan pendampingan pengelolaan arsip dinamis dan arsip vital keseluruhan perangkat daerah hingga menghasilkan daftar arsip.
- Meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan keseluruhan perangkat daerah dengan target pengawasan internal mendapatkan kategori B (Baik).
- Menggunakan Aplikasi SRIKANDI keseluruhan perangkat daerah dalam transaksi internal dan eksternal kearsipan.
- Meningkatkan Jumlah dan Kompetensi Arsiparis melalui pendidikan dan pelatihan kearsipan, sertifikasi dalam jabatan dan atau teknis tertentu yang diselenggarakan ANRI.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Lampung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2025

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN  
DAN KEARSIPAN,**



**RISKI SOFYAN, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.198001111998101001